

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PIUTANG DALAM MENGELOLA
PIUTANG MACET (STUDI KASUS PADA PNPM-MANDIRI
PERDESAAN KECAMATAN BILAH BARAT KABUPATEN
LABUHANBATU)**

SKRIPSI

Oleh:

**Siti Aminah Pane
NIM. 0502162083**

**Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PIUTANG DALAM MENGELOLA
PIUTANG MACET (STUDI KASUS PADA PNPM-MANDIRI
PERDESAAN KECAMATAN BILAH BARAT KABUPATEN
LABUHANBATU)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S. Akun) Pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

**Siti Aminah Pane
NIM.0502162083**

**Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2020

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PIUTANG DALAM MENGELOLA PIUTANG
MACET (STUDI KASUS PADA PNPM-MANDIRI PERDESAAN KECAMATAN
BILAH BARAT KABUPATEN LABUHANBATU)**

Oleh:

Siti Aminah Pane
NIM.0502162083

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah
Medan, Oktober 2020

Pembimbing I



Dr. Marliyah, MA
NIDN. 2026017602

Pembimbing II



Rahmat Daim Harahap, M. Ak
NIDN. 0126099001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



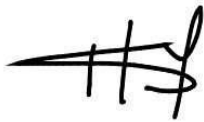
Hendra Harmain, S.E., M. Pd
NIDN. 2010057302

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“SISTEM PENGENDALIAN INTERN PIUTANG DALAM MENGELOLA PIUTANG MACET (STUDI KASUS PADA PNPM-MANDIRI PERDESAAN KECAMATAN BILAH BARAT KABUPATEN LABUHANBATU)”** an. Siti Aminah Pane, NIM 0502162083 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada 27 Oktober 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 27 Oktober 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Akuntansi Syariah

Ketua



Hendra Harmain, S. E, M. Pd
NIDN. 2010057302

Sekretaris

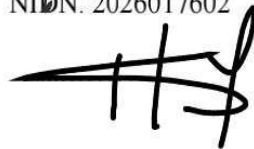


Kusmilawaty, M. Ak
NIDN. 2014068001

Anggota



Dr. Marliyah, MA
NIDN. 2026017602



Hendra Harmain, S. E, M. Pd
NIDN. 2010057302



Rahmat Daim Harahap, M. Ak
NIDN. 0126099001



Kusmilawaty, M. Ak
NIDN. 2014068001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN-SU Medan

Dr. Andri Soemitra, MA
NIDN. 200705760

ABSTRAK

Siti Aminah Pane, 2020. Sistem Pengendalian *Intern* Piutang Dalam Mengelola Piutang Macet (Studi Kasus Pada PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu). Di bawah bimbingan, Pembimbing I oleh Ibu Dr. Marliyah, MA dan Pembimbing II oleh Bapak Rahmat Daim Harahap, M. Ak.

Sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah kemiskinan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan program PNPM Mandiri sejak tahun 2007 dan berakhir pada tahun 2015. Namun salah satu program PNPM Mandiri yaitu SPP (Simpan Pinjam Perempuan) masih berjalan hingga saat ini karena program dianggap baik dan masih banyak piutang yang beredar. Tidak sedikit dalam piutang sering ditemui masalah seperti piutang macet, meskipun dalam pengelolaan SPP ini sudah sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur), dan berbagai macam cara dalam penyelesaian piutang bermasalah sudah dilakukan tetap saja terjadi piutang macet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil perhitungan kolektibilitas piutang dan hasil perhitungan *NonPerforming Loan* terhadap kolektibilitas piutang SPP di Bilah Barat selama tahun 2016 s/d 2018, kemudian untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian intern piutang yang diterapkan oleh PNPM Mandiri bagian SPP Bilah Barat dalam mengelola piutang macet. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan apa adanya pengendalian internal yang terjadi di PNPM bagian SPP Bilah Barat. Adapun metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini (1) Rata-rata persentase kolektibilitas piutang selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 s/d 2018 untuk kategori lancar sebesar 28,72%. (2) Rata-rata persentase *NonPerforming Loan* sebesar 61% karna melebihi 10% NPL untuk SPP Bilah barat termasuk dalam kategori risiko tinggi (*high*) yang artinya pengelolaan *intern* piutang macet SPP Bilah Barat masih tidak efektif. (3) Pengendalian intern piutang yang diterapkan PNPM Mandiri bagian SPP Bilah Barat sudah bagus, yaitu dengan menggunakan sistem tanggung renteng. Didalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 280, hendaklah pemberi pinjaman memberi keringanan waktu bagi peminjam jika ia tidak mampu membayarnya sesuai waktu yang telah ditentukan, namun menyedekahkan sebagian atau seluruh pinjaman itu lebih baik jika memang si peminjam benar-benar tidak mampu membayarnya.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian *Intern*, Piutang, Pengelolaan Piutang Macet

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, dan telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan Proposal Skripsi yang berjudul **“SISTEM PENGENDALIAN INTERN PIUTANG DALAM MENGELOLA PIUTANG MACET (STUDI KASUS PADA PNPM-MANDIRI PERDESAAN KECAMATAN BILAH BARAT KABUPATEN LABUHANBATU)”** dengan lancar, Shalawat dan salam kepada nabi tercinta Rasulullah SAW, semoga senantiasa tercurah dan mendapat syaafaatnya di yaumul akhir nanti.

Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penulisan Skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan, bimbingan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, segala hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik. Untuk itu, penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam karena telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Marliyah, MA selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Rahmat Daim Harahap, M. Ak selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Hendra Harmain, M. Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Ibu Kusmilawaty, SE., M. Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan juga sekaligus Penasehat Akademik yang sudah sangat baik hati memberikan arahan dan kemudahan dalam penulisan Skripsi ini.
7. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Bapak M. Karta Dinata, SE selaku Camat Bilah Barat yang telah memberikan izin riset kepada penulis sehingga penulis dapat melakukan penelitian di PNPM-MPd bagian SPP Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.
9. Pihak UPK selaku Staff PNPM-Mpd bagian SPP Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu yang telah bersedia diwawancarai sehingga dapat memenuhi kelengkapan Skripsi ini.
10. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan setiap kebutuhan penulis dengan penuh cinta dan sabar yang ikhlas dan juga tulus.
11. Keluarga besar ayah Totap Pane dan ibu Roihani Hasibuan terkhususnya kak Mega Pane, kak Arfah Pane, dek Fauziah Pane yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan penuh cinta dan sabar dengan ikhlas.
12. Ade Irma Ritonga sebagai teman marah, teman sabar mau mendengar keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sabar dan memberikan semangat dan doa dengan ikhlas.
13. Keluarga besar LDK Al-Izzah UIN Sumatera Utara khususnya grup Cute Girl, untuk mbak Yuni, Cut, Fatimah, Wahida, Nurul, kak Lisa, Novi, dek Rini, Fatma dan akhwat-akhwat LDK Al-Izzah UINSU yang telah memberikan doa, cinta dan semangat kepada penulis.

14. Keluarga besar jurusan Akuntansi Syariah angkatan 2016, AKS D 16 terlebih untuk Aina, Aini, Adel dan Wendy sweet sebagai teman berjuang teman suka duka dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Alumni kos wak Mursal, Murdia, kak Dwi, kak Eka dan Nurdiana yang suka memberikan bantuan doa dan semangat kepada penulis.
16. Keluarga besar grup Sahabat Syurga, ummil, jiah, resni, omi, rida, suci, yanti sudah memberikan semangat dan doa kepada penulis.

Medan, 07 Oktober 2020

Siti Aminah Pane

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis.....	9
1. Konsep Dasar Piutang	9
a. Pengertian Piutang dan Jenisnya	9
b. Piutang Menurut Pandangan Islam	11
c. Kredit dan Kolektibilitas Kredit.....	12
d. Faktor Penyebab Piutang Macet atau Bermasalah	16
e. Prosedur Penagihan Piutang.....	17
f. Penanganan Kredit Macet atau Bermasalah (Nonperforming Loan)	18
2. Konsep Pengendalian Internal.....	20
a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal.....	20
b. Tujuan Sistem Pengendalian Internal.....	20
c. Komponen Pengendalian Internal	21
d. Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal	25
e. Pengendalian Internal atas Piutang Usaha	26
f. Pengendalian Internal dalam Perspektif Islam	27
B. Kajian Terdahulu.....	28
C. Kerangka Pemikiran.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Metode Analisis Data.....	35

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian.....	36
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	36

a.	Profil Singkat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)	36
b.	Gambaran Umum dan Prosedur Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	38
c.	Ketentuan dan Pelaksanaan Pencairan Dana.....	40
d.	Pelaksanaan Sistem Tanggung Renteng.....	41
e.	Proses Penyelesaian Piutang Menurut Pandangan Islam.....	41
B.	Pembahasan.....	44
1.	Analisis Kolektibilitas Piutang pada UPK Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu.....	44
2.	Perhitungan NPL (<i>NonPerforming Loan</i>).....	49
3.	Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang yang Diterapkan Oleh UPK Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu	52
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	60
B.	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

1.1 Perkembangan Jumlah Piutang dan Piutang Macet PNPM-MPd bagian SPP Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu Tahun 2016-2018	4
2.1 Penggolongan Kolektibilitas	16
2.2 Kajian Terdahulu.....	29
3.1 Waktu Penelitian	33
3.2 Daftar Informan.....	34
4.1 Kolektibilitas Berdasarkan Saldo Pinjaman UPK Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu	45
4.2 Data Penggolongan Kolektibilitas UPK Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu	46
4.3 Rasio Kolektibilitas Kredit Terhadap Total Kredit Tahun 2016 s/d 2018.....	48
4.4 Data <i>NonPerforming Loan</i> SPP UPK Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu Tahun 2016 s/d 2018	49
4.5 Total Kredit Kategori KL, D dan M SPP UPK Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu	50
4.6 Hasil Perhitungan <i>NonPerforming Loan</i> SPP UPK Bilah Barat Tahun 2016 s/d 2018	50
4.7 Analisa Data Kolektibilitas SPP UPK Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu Tahun 2016 s/d 2018	51

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran.....	31
4.1 Struktur Kepengurusan UPK di Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia bisnis, perusahaan yang berhutang merupakan hal yang wajar. Bahkan kalau dicermati dalam laporan keuangan, hampir tidak ada perusahaan yang tidak memiliki hutang. Bahkan pemerintah dengan giat memberikan bantuan-bantuan dana yang bersifat lunak kepada usaha kecil menengah (UKM) agar UKM dapat bertahan dalam mengembangkan usahanya.

Perusahaan bertujuan untuk mencapai laba yang maksimal. Melalui pendapatan yang diperoleh, perusahaan akan terus beroperasi dan mengembangkan usahanya. Siklus pendapatan terutama piutang usaha perlu diperhatikan untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Salah satu risiko yang mungkin terjadi seperti piutang macet.

Piutang menunjukkan adanya klaim perusahaan kepada pihak (perusahaan) lain dalam bentuk uang, barang, jasa atau dalam bentuk aktiva non kas lainnya yang harus dilakukan penagihan pada tanggal jatuh temponya. Piutang usaha dapat berupa tagihan yang timbul karena penjualan barang dagangan dan jasa atau penjualan aktiva lainnya yang dilakukan secara kredit dan transaksi-transaksi lainnya.¹

Dalam ajaran Islam, utang piutang merupakan muamalah yang diperbolehkan dan sangat dianjurkan memberikan piutang kepada orang yang membutuhkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 245, artinya: *“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang*

¹Ahmad Syafi'i Syakur, *Intermediate Accounting*, (Jakarta: AV Publisher, 2009), h.93.

*banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki), dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”*²

Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar yang ada dalam neraca perusahaan. Perusahaan diharapkan memiliki pengelompokan piutang berdasarkan jatuh temponya. Pengelompokan ini berguna untuk mengantisipasi tindakan dan yang kedua untuk keputusan mengambil tindakan lebih lanjut. Adapun pengelompokan piutang berdasarkan jatuh temponya adalah sebagai berikut (sebagai contoh jatuh tempo yang terjadi 60 hari):

- a. Piutang standar, yaitu piutang yang masih bisa tertagih karena dalam kurun waktu jatuh tempo yang masih berjalan (< 60 hari).
- b. Piutang jatuh tempo, yaitu kondisi piutang yang sudah jatuh tempo dan harus terjadi penagihan (60 hari).
- c. Piutang *over due*, yaitu kondisi piutang yang melebihi batas jatuh tempo, namun masih bisa ditolerir dengan alasan yang bisa diterima perusahaan (60 hari + 30 hari).
- d. Piutang *over limit*, yaitu kondisi piutang yang sangat melebihi batas maksimal jatuh tempo dan melebihi tingkat fleksibilitas jatuh tempo (> 90 hari).
- e. Piutang yang tak tertagih, yaitu kondisi piutang yang benar-benar tidak bisa tertagih dengan baik (365 hari)³.

Piutang biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30 hari sampai 60 hari. Dampak dari pemberian piutang ini, nantinya dapat menyebabkan munculnya piutang macet atau bermasalah. Penyebab piutang macet bisa terjadi dari segi pemilik piutang karena kurangnya usaha penagihan, kurangnya kontrol dari pemberi piutang, kurangnya analisis seleksi dalam pemberian kredit, sedangkan dari segi pihak yang berutang penyebabnya bisa bermacam-macam, misalnya pihak yang berutang tiba-tiba

²Al-Jumānatul ‘Alī, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, (Bandung: J-Art, 2004), h.39.

³Hengki Irawan Setia Budi, SE, *Bijak Mengelola Piutang (Smart In Account Receivable)*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), h.7-8.

mengalami kesulitan keuangan, kebangkrutan usaha atau pihak yang berutang memang mempunyai motif secara sengaja tidak membayar utangnya. Seperti yang terjadi pada pengendalian piutang PNPM-MPd di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal mensejahterakan masyarakat dengan memberdayakan masyarakat, salah satu program PNPM-Mandiri di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu yaitu program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) yang dikhususkan untuk para perempuan-perempuan dalam mengembangkan usaha atau menciptakan usaha dengan pemberian modal guna membantu perekonomian keluarga.

Dasar hukum pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mengacu pada landasan Konstitusional Undang-undang Dasar 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang akan disusun kemudian. Sesuai dengan Perpres 15/2010, pemerintah mengembangkan tiga kelompok program kemiskinan, yaitu salah satunya terdapat pada klaster II tentang pemberdayaan masyarakat atau PNPM-Mandiri.⁴

Sejak tahun 2008 Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Sistem pemberian pinjaman dengan kelompok dan setiap kelompok berisikan 8 s/d 16 orang, yang kepengurusan kelompoknya jelas dengan ketua kelompok sebagai perwakilan kelompok untuk menagih utang di kelompok tersebut. Pemberian pinjaman sesuai tujuan program SPP diperuntukkan khusus untuk perempuan yang mempunyai usaha atau menciptakan usaha sebagai bentuk usaha pemerintah dalam mengembangkan perekonomian. Anggota kelompok pinjaman wajib meminta persetujuan dari salah satu pihak keluarganya,

⁴ www.pnpm-mandiri.org, diakses pada tanggal 22 Juni 2020 11.15 WIB

dengan menandatangani surat persetujuan dari suami atau salah satu anggota keluarga peminjam tersebut, kemudian melampirkan fotokopi KTP, dan juga pasphoto.

Setiap melakukan pinjaman pasti selalu saja ada penunggakan pembayaran yang menyebabkan piutang macet atau bermasalah. Hal ini seharusnya ditindaki dengan tegas, karena seharusnya dana pinjaman yang sudah lunas akan digulirkan ke kelompok lainnya.⁵

Berdasarkan data yang peneliti peroleh langsung dari kantor PNPM-MPd bagian SPP Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, peneliti mendapatkan perkembangan total jumlah piutang dan besaran piutang macet PNPM-MPd bagian SPP Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Piutang dan Piutang Macet PNPM-MPd bagian SPP Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu Tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah Piutang (Dalam Rupiah)	Jumlah Piutang Macet	Persentase Piutang Macet (100%)
2018	1,175,297,000	351,561,000	29,91%
2017	1,138,783,000	337,539,000	29,64%
2016	1,117,939,000	344,593,000	30,82%

Sumber: PNPM-MPd bagian SPP Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu

Berdasarkan tabel perkembangan jumlah piutang dan piutang macet PNPM-MPd bagian SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu dapat dilihat bahwa persentase piutang macet dari tahun 2016 sebesar 30,82% dan mengalami penurunan ditahun 2017 sebesar 29,64% kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2018 sebesar 29,91%. Salah satu penyebabnya bisa terjadi yaitu kurangnya ketegasan dari pihak yang bertugas dalam penagihan piutang sehingga para kelompok menjadi sepele dalam menanggapi membayar utangnya meskipun sudah jatuh tempo. Meskipun pihak UPK Bilah Barat telah melakukan

⁵Syahriza, Ketua UPK PNPM-MPd Bagian SPP, Wawancara di Kantor PNPM-MPd SPP Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, Tanggal 10 Maret 2020

penagihan piutang dalam penyelesaian piutang bermasalah dengan menelpon atau mengirim surat, *door to door*, maupun dengan musyawarah bersama kelompok didampingi kepala desa, bahkan sudah sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur). Namun, upaya dalam penyelesaian piutang macet di PNPM Mandiri bagian SPP Bilah Barat masih belum efektif dilihat dari tabel di atas bahwa angka piutang macet nya masih saja tinggi. Kemudian, banyaknya para anggota kelompok masih awam pengetahuannya tentang pemerintahan, sehingga mereka mengira uang negara adalah uang rakyat, jadi jika tidak dikembalikan maka tidak apa-apa. Selain itu, kurangnya pendapatan ekonomi dari para anggota kelompok sehingga menyebabkan kesulitan dalam membayar pinjaman. Seperti penuturan dari salah satu ketua kelompok “Matahari” dan anggota kelompok “Purnama” di desa Sibargot melalui wawancara singkat: *“Di kelompok Matahari sendiri sudah mengalami penunggakan pembayaran sampai berbulan-bulan, alasannya karna modal yang sudah kami terima tidak mampu kami kembalikan lagi disebabkan beberapa diantara kami mengalami kesulitan ekonomi, bahkan sebagian anggota kelompok menganggap kalau uang ini kan uang negara, nggak apa-apa kalau gak dibayar.”*⁶

*“Saya sudah tiga bulan terakhir tidak melakukan pembayaran SPP yang seharusnya dibayar setiap bulannya kepada PNPM, karena keluarga saya mengalami kesulitan, lagipula sudah seharusnya pemerintah membantu setiap masyarakat yang kesulitan, modal SPP ini kan merupakan uang negara yang juga rakyat berhak atas uang negara ini”.*⁷

Pada penelitian yang dilakukan oleh Destiana Restu Prastiwi dengan judul “Analisis Pengendalian Intern Sistem Pemberian Kredit Berbasis Coso Studi Kasus di BPR Chandra Muktiartha”, dengan latar belakang masalah penelitian yaitu Bank harus benar-benar memperhatikan dipatuhinya sistem pengendalian *intern* dalam pemberian fasilitas kredit

⁶Norma, Ketua Kelompok Matahari SPP di PNPM-MPd Bilah Barat, wawancara pada tanggal 21 September 2020.

⁷Ati, Anggota Kelompok Purnama SPP di PNPM Bilah Barat, wawancara pada tanggal 21 September 2020

sehingga risiko akan adanya kredit bermasalah dapat diperkecil. Kredit bermasalah ini dapat mengganggu kelancaran usaha bank yang tentunya dapat menimbulkan krisis kepercayaan dari masyarakat. Dengan terselenggaranya sistem pengendalian *intern* yang memadai, terutama dalam bidang perkreditan berarti menunjukkan sikap kehati-hatian bank dalam menjaga kepercayaan kelangsungan hidup usahanya. Sistem pengendalian *intern* dalam memberikan kredit yang digunakan berdasarkan pada unsur pengendalian COSO (*The Committe of Sponsoring Organization*).

Untuk mampu berperan sebagai badan usaha yang kuat BPR Chandra Muktiartha melalui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pemberian kredit dan berusaha mengurangi resiko kegagalan kredit.⁸

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ena Yuliana yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pengawasan Piutang Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kecamatan Tambang” dengan latar belakang masalah penelitian yang dilakukan yaitu banyaknya terjadi penunggakan pembayaran setiap tahunnya sehingga terjadi piutang macet atau piutang bermasalah, kemudian diasumsikan sebagai piutang tak tertagih oleh PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Tambang tanpa menentukan taksiran jumlah piutang yang tak tertagih atau dengan kata lain PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Tambang menggunakan metode penghapusan langsung untuk piutang tak tertagihnya.⁹

Dari uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian di PNPM-MPd Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, bagaimana sebenarnya pengendalian *intern* piutang yang diterapkan UPK PNPM-MPd Bilah Barat pada simpan pinjam perempuan (SPP) dengan judul **“Sistem Pengendalian**

⁸Destiana Restu Prastiwi, Skripsi. “*Analisis Pengendalian Intern Sistem Pemberian Kredit Berbasis COSO Studi Kasus di BPR Chandra Muktiartha*”, (Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta, 2017, h.3-4.

⁹Ena Yuliana, Skripsi. “*Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pengawasan Piutang Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Tambang*”, (Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau, 2012), h.4-5.

Intern Piutang dalam Mengelola Piutang Macet pada PNPM-Mandiri Perdesaan bagian SPP Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu”.

Penelitian ini difokuskan pada pengendalian *intern* piutang macet pada PNPM-MPd bagian SPP di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2016-2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil perhitungan analisis data kolektibilitas SPP (Simpan Pinjam Perempuan) di UPK Bilah Barat selama tahun 2016 s/d 2018?
2. Bagaimana hasil perhitungan NPL (*NonPerforming Loan*) terhadap data kolektibilitas SPP di UPK Bilah Barat selama tahun 2016 s/d 2018?
3. Bagaimanakah sistem pengendalian *intern* piutang dalam mengelola piutang macet yang diterapkan PNPM-Mandiri Perdesaan bagian SPP di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui hasil perhitungan analisis data kolektibilitas SPP (Simpan Pinjam Perempuan) di UPK Bilah Barat selama tahun 2016 s/d 2018.
- b. Mengetahui hasil perhitungan NPL (*NonPerforming Loan*) terhadap data kolektibilitas SPP di UPK Bilah Barat selama tahun 2016 s/d 2018.
- c. Mengetahui sistem pengendalian *intern* piutang dalam mengelola piutang macet yang diterapkan PNPM-Mandiri Perdesaan bagian SPP di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi teoritis, dapat menambah wawasan lebih luas mengenai Pengendalian *Intern* Piutang.
- b. Bagi praktis, dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan dalam melakukan Pengendalian *Intern* Piutang.
- c. Bagi Civitas Akademisi, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai Pengendalian *Intern* Piutang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Dasar Piutang

a. Pengertian Piutang dan Jenisnya

Piutang adalah segala bentuk tagihan atau klaim perusahaan kepada pihak lain yang pelunasannya dapat dilakukan dalam bentuk uang, barang maupun jasa.¹

Banyak perusahaan melakukan penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak barang atau jasa. Piutang yang dihasilkan dari penjualan semacam itu biasanya diklasifikasikan sebagai piutang usaha atau wesel tagih (*notes receivable*), istilah piutang (*receivables*) mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Piutang-piutang ini biasanya merupakan bagian yang signifikan dari total aset lancar.²

Piutang dapat diklasifikasikan secara umum, yaitu:

- 1) Klasifikasi piutang untuk tujuan akuntansi dikelompokkan dalam dua golongan sesuai dengan penyajian laporan keuangan.
 - a) Piutang lancar (*Current Receivables*), yaitu piutang yang diharapkan akan diterima pelunasannya dalam jangka waktu satu tahun atau dalam periode siklus kegiatan normal perusahaan.
 - b) Piutang tidak lancar (*Noncurrent Receivables*), yaitu piutang yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun atau dalam periode siklus kegiatan normal perusahaan.
- 2) Klasifikasi piutang menurut sumber atau asal terjadinya piutang.

¹Iwan Setiawan, *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting)*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h.19.

²James M.Reeve, dkk, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.437.

- a) Piutang dagang adalah piutang yang timbul dari penjualan secara kredit barang dagangan, barang hasil produksi atau jasa yang dihasilkan.
- b) Piutang nondagang adalah piutang yang timbul dari transaksi yang tidak secara langsung berhubungan dengan penjualan kredit, misalkan piutang kepada karyawan, piutang pendapatan bunga atau piutang kepada pemegang saham.³

Faktor yang mempengaruhi harga pertukaran dalam suatu transaksi penjualan barang dan jasa yaitu:

1) Potongan Penjualan (*Trade Discounts*)

Potongan penjualan yaitu selisih antara harga jual (bruto) menurut daftar harga jual yang dipublikasikan dibandingkan dengan harga yang sesungguhnya dibayar oleh pembeli sebelum dikurangi dengan potongan tunai.

2) Potongan Tunai (*Cash Discounts*)

Potongan tunai merupakan suatu cara untuk mendorong agar pembeli bersedia membayar atau melunasi kewajiban-kewajibannya segera setelah barang-barang diserahkan kepadanya. Syarat-syarat pembayaran di dalam transaksi penjualan kredit biasanya dinyatakan dengan syarat penjualan seperti:

- 2/10, n/30 yang berarti potongan sebesar 2% akan diberikan kepada pembeli yang membayar dalam jangka waktu 10 hari sejak terjadinya transaksi penjualan dengan jangka waktu pembayaran secara keseluruhan selama 30 hari.

3) Retur Penjualan

Retur penjualan ialah suatu kelonggaran yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan untuk mengembalikan dan menolak barang-barang yang dibelinya. Seperti: potongan penjualan, retur penjualan harus

³Hengki Irawan Setia Budi, *Bijak Mengelola Piutang (Smart In Accounting Receivable)*, (Jakarta, 2011), h.3-4.

dikurangkan dari hasil penjualan. Retur penjualan mengakibatkan tidak seluruh jumlah yang dibebankan kepada debitur di dalam transaksi penjualan (kredit) dapat ditagih.

b. Piutang Menurut Pandangan Islam

Dalam ajaran Islam, utang piutang adalah muamalah yang diperbolehkan bahkan sangat dianjurkan memberikan piutang kepada orang yang membutuhkan untuk meringankan kesulitannya, akan tetapi harus berhati-hati dalam penerapannya, karena bisa jadi faktor penyebab orang lain masuk surga atau neraka. Allah SWT berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki), dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah 2: ayat 245)⁴

إِنْ تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan (pembalasannya) kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa, lagi Maha Penyantun.” (QS. At-Taghabun 64 : ayat 17)⁵

Meskipun demikian, di dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Bilah Barat menerapkan sistem bunga atau riba, yaitu sebesar 10% per tahun. Allah sangat melarang keras praktik riba, dalam Al-

⁴Al-Jumānatul ‘Alī, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, (Bandung: J-Art, 2004), h.39.

⁵*Ibid.*, h.557.

Qur'an terdapat banyak ayat-ayat Allah tentang haram tidak bolehnya praktik riba. Begitu juga dengan Rasulullah dalam hadis berikut:

“Dari Jabir r.a. berkata, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya, dan dua saksinya, dan Beliau berkata, mereka semua adalah sama.” (HR. Muslim)

Hadis di atas menggambarkan mengenai bahaya dan buruknya riba bagi kehidupan kaum Muslimin. Begitu buruk dan bahayanya riba, sehingga digambarkan bahwa Rasulullah SAW melaknat seluruh pelaku riba. Pemakannya, pemberinya, pencatatnya maupun saksi-saksinya. Semua golongan yang terkait dengan riba tersebut dikatakan oleh Rasulullah SAW: “Mereka semua adalah sama.” Pelaknat Rasulullah SAW terhadap para pelaku riba menggambarkan betapa mungkarnya perbuatan riba, mengingat Rasulullah SAW tidak pernah melaknat suatu keburukan, tetapi keburukan tersebut membawa kemudharatan yang luar biasa, baik dalam skala individu bagi para pelakunya maupun masyarakat secara luas. Oleh karenanya, setiap muslim wajib menghindarkan diri dari praktik riba dalam segenap aspek kehidupannya.⁶

Meskipun memberikan piutang merupakan niat yang baik dalam meringankan perekonomian seseorang, tetapi alangkah baiknya jika menolong kesulitan itu dengan bersedekah dan piutang tanpa bunga atau hal-hal yang melibatkan praktik riba.

c. Kredit dan Kolektibilitas Kredit

Secara *etimologis* istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan.

⁶Isnaini Harahap, dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Medan: Kencana, 2015), h. 190-191.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan uang oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan beberapa ketentuan yang telah disepakati bersama dan tagihan yang dibayarkan sesuai dengan nilai yang diberikan.

1) Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

b) Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum diluncurkan.

c) Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak.

d) Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya

karena bencana alam atau kebangkrutannya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diperolehnya.

e) Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.⁷

f) Jaminan Kredit

Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari risiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengaman. Dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin, risiko kredit macet tidak dapat dihindari. Pagar pengaman yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban, sehingga si nasabah akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambilnya. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaiknya, dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan.⁸

g) Kolektibilitas Kredit

Sesuai ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas atau *Collecttability* adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali

⁷Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h.114-115.

⁸*Ibid.*, h.123-124.

dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Penggolongan kredit berdasarkan kategori tertentu guna memantau kelancaran pembayaran kembali (angsuran) oleh debitur. Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Bank Indonesia No. 31/147/Kep/DIR Tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif pasal 6 ayat 1, membagi tingkat kolektibilitas kredit menjadi:

- Kredit lancar, yaitu kredit yang perjalanannya lancar atau memuaskan, artinya segala kewajiban (bunga atau angsuran utang pokok) diselesaikan oleh nasabah secara baik).
- Kredit dalam perhatian khusus, yaitu kredit yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar, debitur mulai menunggak.
- Kredit tidak lancar, yaitu kredit yang selama 3 atau 6 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran bunga atau utang pokoknya tidak baik. Usaha-usaha *approach* telah dilakukan tapi hasilnya tetap kurang baik.
- Kredit diragukan, yaitu kredit yang telah tidak lancar dan telah pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan.
- Kredit macet sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah kredit tersebut dikategorikan kedalam kredit macet.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Penggolongan Kolektibilitas

Lama Tunggakan/DPD (Hari)	Kolektibilitas	Keterangan
0	1	Lancar
1-90	2	Dalam Perhatian Khusus
91-120	3	Kurang Lancar
121-180	4	Diragukan
>180	5	Macet

Sumber: Jurnal “Analisis Kolektibilitas Kredit Pada PD. BPR BKK Purworejo Cabang Bayan”

Berdasarkan penggolongan kredit di atas maka akan diketahui rasio kreditnya terhadap total kredit yang diberikan atau tingkat pengembalian kreditnya dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kredit Lancar} = \frac{\text{Lancar}}{\text{kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Rumus di atas untuk mengetahui rasio kredit lancar maka total dari seluruh kredit yang tergolong kedalam kategori lancar, sedangkan untuk kategori lainnya juga digunakan rumus yang sama.⁹

d. Faktor Penyebab Piutang Macet atau Bermasalah

Kredit macet dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Faktor internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari pihak kreditur yang terdiri dari:
 - a) Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit
 Administrasi kredit merupakan pengelolaan mengenai pencatatan, penyimpanan dokumen dan pembuatan laporan yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit. Proses administrasi menghasilkan output berupa sistem informasi sebagai umpan balik bagi manajemen suatu bank/non bank dalam melaksanakan tugasnya secara lengkap.
 - b) Lemahnya sistem informasi kredit

⁹Istiningsih, Jurnal. “Analisis Kolektibilitas Kredit Pada PD. BPR BKK Purworejo Cabang Bayan”, (Diakses pada tanggal 23 Maret 2020 pukul 07:38 WIB)

- c) Sistem informasi kredit yang tidak sengaja berjalan sebagaimana seharusnya akan memperlemah keakuratan pelaporan perusahaan yang pada gilirannya akan sulit melakukan deteksi dini.
 - d) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit
Berupa kurang disiplinnya penerapan prosedur perkreditan sesuai dengan pedoman dan tata cara pemberian kredit, hal ini disebabkan karena jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang menangani kredit kurang memadai.
- 2) Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari pihak debitur yang terdiri dari:
- a) Kondisi ekonomi
Konsumen tidak mampu melunasi kewajibannya diakibatkan menurunnya pendapatan ekonomi, karena semakin mahalnya kebutuhan bahan pokok.
 - b) Konsumen mengalami musibah
Musibah dapat terjadi pada debitur misalnya meninggal dunia, lokasi usaha mengalami kebakaran atau kerusakan usaha debitur tidak dilindungi dengan asuransi.
 - c) Konsumen melarikan diri
Sebagian dari banyaknya konsumen mempunyai rencana untuk tidak membayar kredit dan melarikan diri untuk menghindari dari kewajibannya untuk melunasi kreditnya.¹⁰

e. Prosedur Penagihan Piutang

Ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan penagihan piutang adalah sebagai berikut:

- 1) Melalui Surat

¹⁰Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h.45-47.

Teknik ini dilakukan bilamana pembayaran hutang pelanggan dari pelanggan sudah lewat beberapa hari dari waktu yang telah ditentukan tetapi belum dilakukan pembayaran.

2) Melalui Telepon

Teknik ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari teknik sebelumnya, yaitu apabila setelah pengiriman surat teguran ternyata tagihan belum dibayar.

3) Kunjungan Personal

Kunjungan personal yaitu dengan cara melakukan kunjungan secara personal atau pribadi ke tempat pelanggan.

4) Tindakan Yuridis (Melalui Hukum)

Teknik ini yang paling akhir dilakukan apabila ternyata pelanggan tidak menunjukkan itikad yang baik untuk melaksanakan kewajiban membayar hutangnya.¹¹

f. Penanganan Kredit Macet atau Bermasalah (*NonPerforming Loan*)

Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau *NonPerforming Loan* (NPL) apabila kualitas kredit tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau macet. Untuk menyelesaikan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: *Pertama*, penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui tahap perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur. *Kedua*, penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum dan dalam hal ini Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui badan peradilan, dan melalui badan arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa (BAPS).

Penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

¹¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta, 2003), h.59.

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) adalah suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu pembiayaan termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran.

2) Persyaratan Kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*) adalah melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal angsuran, dan atau jangka waktu pembiayaan saja. Tetapi perubahan pembiayaan tersebut tanpa memberikan tambahan pembiayaan atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi *equity* perusahaan.

3) Penataan Kembali (*restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*) adalah upaya untuk melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan berupa pemberian tambahan pembiayaan, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian pembiayaan menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan atau *reconditioning*.¹²

Adapun mengenai penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum memang memerlukan waktu yang relatif lama, dan bila melalui badan peradilan maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan pengadilan itu memperoleh kekuasaan hukum tetap (*inkracht van bewijs*), mengingat penyelesaian melalui peradilan itu membutuhkan waktu

¹²Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.71-72.

yang relatif lama, maka penyelesaian kredit bermasalah itu dapat pula melalui lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah. Kehadiran lembaga-lembaga lain itu dimaksudkan dapat mewakili kepentingan kreditur dan debitur dalam penanganan kredit macet.¹³

2. Konsep Pengendalian Internal

a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting bagi perusahaan, dengan adanya pengendalian internal maka kegiatan operasional perusahaan akan berjalan dengan efektif dan efisien sehingga mencegah dan menghindari terjadinya kesalahan, kerusakan, penyalahgunaan, pencurian dan penyelewengan.

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.¹⁴

Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.¹⁵

b. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

COSO (*The Committee of Sponsoring Organization*) mengemukakan tujuan sistem pengendalian internal adalah:

1) Efektifitas dan Efisiensi Operasi

Pengendalian dalam suatu perusahaan atau organisasi akan mendorong sumber daya secara efektif dan efisien untuk mengoptimalkan tujuan dari sistem pengendalian intern agar tidak terjadi penyalahgunaan di dalam perusahaan sehingga mengakibatkan kerugian.

¹³*Ibid.*, h. 77.

¹⁴Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.163.

¹⁵Romney Marshall B. dan Steinbart, Paul John, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 229.

2) Realibilitas Pelaporan Keuangan

Pelaporan yang disajikan oleh pihak manajemen perusahaan harus memiliki tanggungjawab hukum maupun profesionalisme untuk meyakinkan bahwa informasi yang disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan.

3) Kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada

Beragam ketentuan hukum dan peraturan harus diberlakukan oleh setiap perusahaan publik, non publik bahkan organisasi nirlaba. Ketentuan yang berlaku dalam akuntansi tidak langsung yaitu perlindungan terhadap dan hukum hak-hak dan akuntansi langsung dalam perusahaan yaitu penghasilan dan kecurasngan.¹⁶

c. Komponen Pengendalian Internal

Ada lima komponen pengendalian internal, yaitu:

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan dampak kumulatif atas faktor-faktor untuk membangun, mendukung dan meningkatkan efektifitas kebijakan dan prosedur tertentu.¹⁷

2) Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilakukan untuk menangani resiko yang telah diidentifikasi perusahaan.¹⁸

Aktivitas pengendalian dapat dikategorikan dalam beberapa aktivitas diantaranya:

a) Otorisasi Transaksi

¹⁶Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta, 2011), h. 82.

¹⁷Bodnar dan Hopwood, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: Andi, 2006), h. 133.

¹⁸Hall Singleton, *Audit Teknologi Informasi dan Assurance*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h.32.

Tujuan dari otorisasi transaksi adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi material yang di proses oleh sistem informasi valid dan sesuai dengan tujuan pihak manajemen.¹⁹

b) Pemisah Tugas

Terdapat tiga pekerjaan yang harus dipisahkan agar karyawan tidak memiliki peluang untuk mencuri harta perusahaan dan memalsukan catatan akuntansi, yaitu fungsi penyimpanan harta, fungsi pencatat, fungsi otorisasi transaksi bisnis.

c) Dokumen dan Catatan

Dokumen dan catatan adalah objek fisik dimana transaksi dimasukkan dan diikhtisarkan dalam sebuah dokumen yang disebut dengan formulir. Formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang dalam memberikan otorisasi terlaksananya transaksi didalam organisasi.

d) Mengamankan Harta dan Catatan Perusahaan

Harta perusahaan meliputi kas, persediaan, peralatan dan bahkan data dan informasi perusahaan. Yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengamankan harta dan informasi tersebut, antara lain meliputi:

- Menciptakan pengawasan yang memadai.
- Memastikan catatan harta yang akurat.
- Membatasi akses fisik terhadap harta (seperti menggunakan register kas, kotak brankas, dan lain sebagainya).
- Menjaga catatan dan dokumen dengan menyimpan catatan dan dokumen dalam lemari yang terkunci, serta dengan membuat backup yang memadai.
- Pembatasan akses terhadap ruang komputer dan terhadap file perusahaan.
- Prosedur verifikasi adalah pemeriksaan independen terhadap sistem akuntansi untuk mendeteksi kesalahan dan kesalahan penyajian.²⁰

¹⁹*Ibid.*, h. 33.

²⁰*Ibid.*, h. 40.

3) Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan proses identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat atau berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan, serta menentukan cara bagaimana risiko tersebut ditangani.²¹

Semua perusahaan, baik besar maupun kecil, pasti menghadapi risiko internal maupun eksternal dalam usahanya mencapai tujuan perusahaan. Risiko tersebut dapat bersumber dari:

- a) Tindakan tidak sengaja, seperti:
 - Kesalahan yang disebabkan oleh kecerobohan karyawan, kegagalan karyawan untuk mengikuti prosedur tertentu dan karyawan yang tidak atau kurang terlatih.
 - Kesalahan yang tidak sengaja.
 - Kesalahan dalam *mengcopy* data.
 - Sistem yang tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan atau tidak mampu menangani tujuan yang telah ditetapkan.
- b) Tindakan sengaja, seperti:
 - Sabotase, tindakan dengan sengaja merusak sistem informasi akuntansi.
 - Kecurangan karyawan dengan mencuri atau menyalahgunakan harta perusahaan. Adakalanya tindakan ini diikuti dengan pemalsuan catatan akuntansi untuk menutupi kecurangan yang dilakukan.
- c) Bencana alam atau kerusakan politik, seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami, angin ribut, perang atau kerusuhan masa.
- d) Kesalahan perangkat lunak dan kegagalan peralatan komputer, seperti:
 - Kerusakan hardware
 - Kerusakan sistem operasi
 - Kerusakan perangkat lunak
 - Arus listrik yang tidak stabil

4) Informasi dan Komunikasi

²¹Sanyoto Gondodiyoto, *Audit Sistem Informasi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), h. 270.

Informasi harus diidentifikasi, diproses dan dikomunikasikan ke personil yang tepat sehingga setiap orang dalam perusahaan dapat melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik.²² Tujuan utama sistem informasi akuntansi antara lain:

- a) Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid
 - b) Mengklasifikasi transaksi sebagaimana seharusnya
 - c) Mencatat transaksi sesuai dengan nilai moneter yang tepat
 - d) Mencatat transaksi pada periode akuntansi yang tepat
 - e) Menyajikan transaksi dan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan secara tepat.
- 5) Pengawasan

Pengawasan adalah proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian *intern* secara periodik dan terus-menerus. Pengawasan dilaksanakan oleh orang yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian pada waktu yang tepat. Metode utama untuk mengawasi kinerja mencakup:

- a) Supervisi yang efektif

Supervisi yang efektif mencakup melatih dan mendampingi pegawai mengawasi kinerja mereka, mengoreksi kesalahan dan melindungi aset dengan cara mengawasi pegawai yang memiliki akses ke hal-hal tersebut.
- b) Akuntansi pertanggungjawaban

Sistem akuntansi pertanggungjawaban mencakup anggaran, kuota, jadwal, biaya standar, dan standar kualitas; laporan kinerja yang membandingkan kinerja yang aktual dengan kinerja yang direncanakan, serta menunjukkan perbedaan yang signifikan; dan prosedur untuk menyelidiki perbedaan yang signifikan dan mengambil tindakan tepat pada waktunya, untuk mengoreksi kondisi-kondisi yang mengarah pada perbedaan tersebut.
- c) Audit internal

²²Sefrida Hanum, et. Al., *Sistem Informasi Akuntansi*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2015), h.95.

Audit internal mencakup peninjauan ulang keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional serta menyediakan penilaian ke-efektifan pengendalian internal.

d. Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal

1) Persekongkolan (Kolusi)

Pengendalian *intern* mengusahakan agar persekongkolan dapat dihindari sejauh mungkin, misalnya dengan mengharuskan giliran bertugas, larangan dalam menjalankan tugas-tugas yang bertentangan oleh mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan, keharusan mengambil cuti dan seterusnya. Akan tetapi pengendalian intern tidak dapat menjamin bahwa persekongkolan tidak terjadi.

2) Perubahan

Struktur pengendalian intern pada suatu organisasi harus selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan dan teknologi.

3) Kelemahan Manusia

Banyak kebobolan terjadi pada sistem pengendalian intern yang secara teoritis sudah baik. Hal tersebut dapat terjadi karena lemahnya pelaksanaan yang dilakukan oleh personil yang bersangkutan. Oleh karena itu personil yang paham dan kompeten untuk menjalankannya merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengendalian *intern*.

4) Azas Biaya-Manfaat

Pengendalian juga harus mempertimbangkan biaya dan kegunaannya. Biaya untuk mengendalikan hal-hal tertentu mungkin melebihi kegunaannya, atau manfaat tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan (*cost-benefit analysis*). Mengenai pengendalian *intern*, seringkali dihadapi dilema antara menyusun sistem pengendalian *intern* yang komprehensif sedemikian rupa dengan biaya yang relatif menjadi

makin mahal, atau se-optimal mungkin dengan risiko, biaya dan waktu yang memadai.²³

e. Pengendalian Internal atas Piutang Usaha²⁴

Berbicara mengenai pengendalian internal atas piutang usaha, yang menjadi pusat perhatian yaitu bagaimana pengamanan yang efisien dan efektif dilakukan atas piutang usaha; baik dari segi pengamanan atas perolehan fisik kas, pemisahan tugas (termasuk masalah otorisasi persetujuan kredit), sampai tersedianya data catatan akuntansi yang akurat dan memadai.

Setiap pengajuan kredit yang dilakukan oleh calon pembeli harus diuji atau dievaluasi terlebih dahulu kelayakan kreditnya. Bagian penjualan tidak boleh merangkap bagian kredit. Manajer penjualan tidak memiliki otoritas atau wewenang untuk menyetujui proposal kredit pelanggan. Apabila bagian penjualan merangkap bagian kredit, dikhawatirkan (terutama apabila komisi penjualan ditetapkan berdasarkan besarnya omzet penjualan) seluruh proposal kredit (tanpa kecuali) yang diajukan calon pembeli akan langsung disetujui tanpa adanya evaluasi terlebih dahulu. Dalam hal ini, kemungkinan besar risiko akan muncul terutama terhadap calon pembeli dengan peringkat kredit yang buruk.

Dalam praktik, ketiadaan pemisahan tugas antara fungsi penjualan dan fungsi kredit, ditambah kurang tepatnya dasar penghitungan komisi, seringkali menimbulkan peluang terjadinya kecurangan. Tidak mustahil, karyawan bagian penjualan akan berusaha memperbesar komisi penjualan dengan cara yang tidak benar; dimana oknum bagian penjualan akan membuat seolah-olah penjualan barang dagangan ke pelanggan sesungguhnya terjadi; padahal penjualan tersebut dilakukan secara fiktif (barang tidak dijual kepada pelanggan sungguhan namun disembunyikan).

²³Sanyoto Gondodiyoto, *Audit sistem Informasi Lanjutan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), h.253.

²⁴Hery, *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 66-67.

Nanti, begitu komisi diperoleh, oknum karyawan tadi akan mengembalikan barang yang telah disembunyikan, seolah-olah telah terjadi retur dari pembeli.

Akan tetapi, secara normatif, jika berbicara mengenai pemisahan tugas (dalam kaitannya dengan pengendalian internal atas piutang usaha), maka harus ada pemisahan fungsi antara bagian persetujuan kredit, bagian penjualan, bagian pencatatan (akuntansi), dan bagian penagihan. Fungsi persetujuan kredit dan fungsi pembukuan memegang peranan sebagai pengecek keabsahan penjualan. Karyawan yang menangani pencatatan piutang usaha tidak boleh ikut terlibat dalam aktivitas penagihan.

f. Pengendalian Internal dalam Perspektif Islam

Pengendalian atau pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, memperbaiki yang salah dan mengembalikan ke jalan yang benar (*shirathalmustaqim*). Pengawasan (*control*) dalam islam terbagi 2 (dua): Pertama, pengawasan yang berasal dari diri sendiri (*selfcontrol*). Kedua, pengawasan yang berasal dari luar diri sendiri, berupa pengawasan yang diatur dalam mekanisme kontrol di organisasi atau perusahaan.²⁵

Pertama, pengendalian (*control*) yang berasal dari luar diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. (QS. Al-Mujaadilah ayat 7)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَا
بُعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَا دِسُّهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ آيْنَ مَا كَانُوا
ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

²⁵Tulus Suryanto, Internal Control, Discipline of Its Impact On Employee Performance, (Case Study On Islam Institute State Raden Intan Lampung, Indonesia, 2014), *Prosiding Seminar Bisnis & Teknologi ISSN*.

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.²⁶

Kedua, pengendalian yang berasal dari luar diri sendiri, seperti yang dilakukan sistem pada sebuah lembaga atau institusi melalui pengawasan dari manajemen yang ada.

Pengendalian *intern* memiliki beberapa landasan, diantaranya:

- 1) *Tawa Shaubil Haqqi*, saling menasehati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas.
- 2) *Tawa Shaubis Shabri*, saling menasehati atas dasar kesabaran dengan kata lain pengendalian yang dilakukan berulang-ulang.
- 3) *Tawa Shaubil Marhamah*, saling menasehati atas dasar kasih sayang, yakni pengendalian dengan pendekatan secara personal dengan tujuan untuk pencegahan (*perventif*).

B. Kajian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Skripsi ini. Disajikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

²⁶Al-Jumānatul ‘Alī, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, (Bandung: J-Art, 2004) h.543.

Tabel 2.2
Kajian Terdahulu

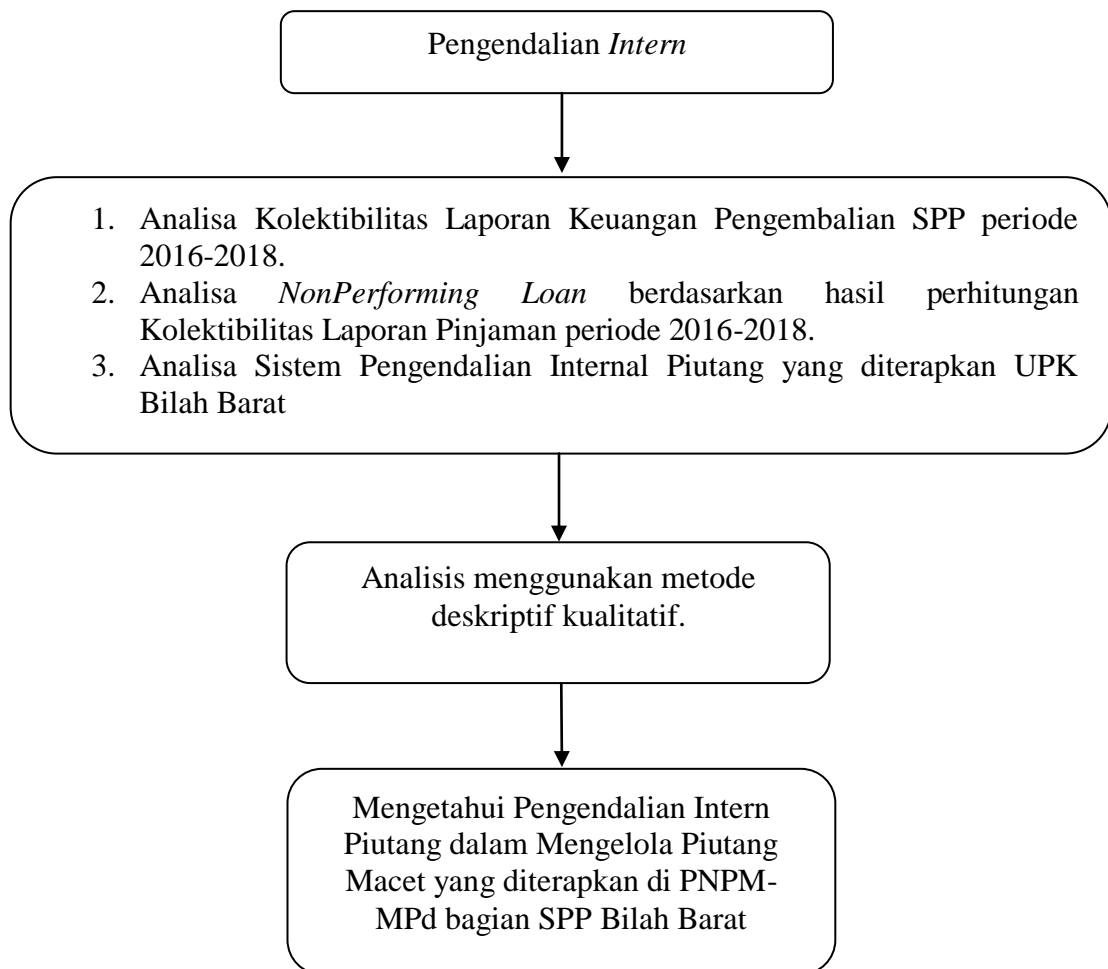
No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
1	Rofiqo Harahap (2018)	Penerapan Sistem Pengendalian <i>Intern</i> Persediaan pada Rumah Sakit Pabatu Tebing Tinggi	Keduanya sama-sama membahas sistem pengendalian <i>intern</i>	Pada penelitian terdahulu ini membahas tentang sistem pengendalian <i>intern</i> persediaan sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pengendalian <i>intern</i> piutang	Penerapan sistem pengendalian persediaan pada rumah sakit Pabatu Tebing Tinggi yaitu: Lingkungan pendendalian masih kurang baik karena adanya SOP yang belum dipatuhi dan dijalankan dengan baik. Aktivitas pengendalian masih belum efektif. Penaksiran resiko, informasi dan komunikasi serta pengawasan sudah dilakukan dengan baik. Akan tetapi penerapan sistem pengendalian <i>intern</i> persediaan rumah sakit Persada tebing Tinggi masih belum efektif.
2	Restu Prastiwi	Analisis Pengendalian <i>Intern</i> Sistem Pemberian Kredit Berbasis COSO Studi Kasus di BPR Chandra Muktiartha	Keduanya sama-sama membahas tentang pengendalian <i>intern</i> piutang	Pada penelitian terdahulu ini hanya membahas tentang pengendalian <i>intern</i> pemberian kredit berbasis COSO saja sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pengendalian <i>intern</i> dalam mengelola piutang macet	Sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh BPR Chandra Muktiartha sudah sesuai dengan standar sistem pemberian kredit. Pengendalian <i>intern</i> pada sistem pemberian kredit di BPR Chandra Muktiartha dalam komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan sebagian besar sudah sesuai kecuali komponen

					lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian.
3	Ena Yuliana	Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pengawasan Piutang Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kecamatan Tambang	Keduanya sama-sama membahas tentang piutang di PNPM Pedesaan	Pada penelitian terdahulu membahas analisis perlakuan akuntansi dan pengawasan piutang sedangkan pada penelitian ini membahas tentang sistem pengendalian <i>intern</i> piutang	Dalam proses pengendalian dan pengawasan pemberian pinjaman kepada SPP masih terdapat kelemahan dalam manajemen PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tambang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tunggakan yang terjadi di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Tambang.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini yaitu Sistem Pengendalian Intern Piutang Dalam Mengelola Piutang Macet di PNPM-Mandiri Perdesaan bagian SPP Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.

Maka kerangka teoritis dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran di atas dapat diketahui dengan menganalisis data laporan kolektibilitas pengembalian pinjaman SPP dan *NonPerforming Loan* periode 2016-2018 untuk mengetahui apakah pengelolaan dan pengendalian *intern* piutang pada PNPM-MPd bagian SPP di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu sudah layak atau belum memenuhi standar yang berlaku. Kemudian penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan analisis Kualitatif untuk mendiskripsikan atau menggambarkan apa adanya yang ada pada Pengendalian Intern Piutang dalam Mengelola Piutang Macet pada PNPM-MPd bagian SPP Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subyek atau obyek penelitian.¹ Dengan kata lain penelitian deskriptif menjabarkan suatu permasalahan dan bukan bertujuan untuk membuktikan suatu teori.

Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller pada awalnya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kualitatif lalu, didefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kekhasannya sendiri.²

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan mendiskripsikan atau menggambarkan apa adanya yang ada pada sistem pengendalian intern piutang dalam mengelola piutang macet di PNPM-MPd bagian SPP Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.

Jenis metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus (*case study*), dengan menganalisa dan mendiskripsikan data berupa laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dan hasil wawancara dengan pihak PNPM-MPd bagian SPP Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Camat Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di UPK Bilah Barat atau PNPM-MPd bagian SPP Kecamatan Bilah barat Kabupaten Labuhanbatu.

¹A. Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.13.

²Azhari Akmal Tarigan, dkk. *Metodologi Penelitian Islam*, (Medan: La-Tansa Press, 2011), h.19.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2020 sampai bulan Oktober 2020.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian										
		Des 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mar 2020	Apr 2020	Mei 2020	Juni 2020	Juli 2020	Agu 2020	Sep 2020	Okt 2020
1.	Pengajuan Judul											
2.	Penyusunan Proposal Skripsi											
3.	Seminar Proposal Skripsi											
4.	Perbaikan Proposal Skripsi											
5.	Penyusunan Skripsi											
6.	Sidang Munaqasah											

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah orang, benda, tempat, yang diamati sebagai subjek pada penelitian ini adalah Pengendalian *Intern* Piutang dalam Mengelola Piutang Macet.

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah hal yang menjadi sasaran, yaitu kolektibilitas laporan pengembalian pinjaman SPP periode 2016-2018 PNPM-MPd di UPK Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang berhubungan langsung dengan penelitian dimana data ini diperoleh dengan cara dokumentasi. Data-data tersebut diperoleh langsung dari informan yang menjadi penanggungjawab atau pihak PNPM-MPd bagian SPP Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu melalui wawancara atau observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder merupakan data pelengkap atas data-data yang memberikan keterangan atau informasi tambahan bagi peneliti, yang menjadi kategori data sekunder misalnya catatan atau arsip perusahaan dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Peneliti melakukan tanya jawab, pembicaraan langsung mengenai sistem pengendalian intern yang terjadi di UPK bagian SPP Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu yaitu disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Daftar Informan

No	Nama	Umur	Jabatan	Keterangan
1	Syahriza	31 tahun	Ketua UPK Bilah Barat	Wawancara pada tanggal 10 Maret 2020
2	Arfah	28 tahun	Sekretaris UPK Bilah Barat	Wawancara pada tanggal 03 Agustus 2020
3	Usuf	30 tahun	Bendahara UPK Bilah Barat	Wawancara pada tanggal 15 Agustus 2020
4	Norma	48 tahun	Ketua Kelompok Matahari SPP Bilah Barat	Wawancara pada tanggal 21 September 2020
5	Ati	36 tahun	Anggota Kelompok Purnama SPP Bilah Barat	Wawancara pada tanggal 21 September 2020

Pengumpulan data dengan dokumentasi, memerlukan alat atau instrumen dalam pengambilan data-data dokumen. Data dokumen dapat berupa foto, gambar, peta, grafik struktur organisasi, catatan bersejarah dan sebagainya. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh data laporan keuangan piutang macet lembaga/organisasi yang terkait dengan pengendalian *intern* piutang pada PNPM-MPd bagian SPP Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan mencari, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumen dan bahan-bahan lain. Sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Langkah analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dengan merangkum, memilih hal-hal pokok dan hanya memilih hal-hal yang penting saja yang terkait dengan Pengendalian Intern Piutang dalam Mengelola Piutang Macet pada PNPM-MPd bagian SPP Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang terkait dengan Pengendalian *Intern* Piutang dalam Mengelola Piutang Macet pada PNPM-MPd bagian SPP Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan adalah tahap terakhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dengan judul Sistem Pengendalian Intern Piutang dalam Mengelola Piutang Macet pada PNPM-MPd bagian SPP Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-Mandiri Perdesaan tepatnya berada di Jl. Lintas Timur Sumatera, Padang Matinggi, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Bilah Barat memiliki luas wilayah 202,98 Km² dan terdiri dari 10 desa¹, yaitu: Sibargot, Bandar Kumbul, Tanjung Medan, Janji, Afdelling I Rantauprapat, Aek Buru Selatan, Afdelling II Rantauprapat, Kampung Baru, Tebing Linggahara dan Tebing Linggahara baru.

a. Profil Singkat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

Pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang dilaksanakan hingga tahun 2015 dan sejalan dengan target MDGs (Millennium Development Goals). PNPM Mandiri terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirin masyarakat miskin perdesaan. Adapun Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas

¹BPS Kabupaten Labuhanbatu, *Kecamatan Bilah Barat Dalam Angka 2019*, h.5.

dan kuantitas prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Adapun tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.²

Dua (2) jenis kegiatan yang dibiayai melalui Bantuan Langsung masyarakat (BLM) yang dilaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu:

- 1) Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi Rumah tangga Miskin (RTM).
- 2) Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan pemberian modal usaha berbentuk pinjaman uang tunai khusus untuk perempuan.

Namun sejak kontrak program PNPM Mandiri berakhir pada tahun 2015, PNPM Mandiri resmi diberhentikan terkecuali kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dikarenakan dana hibah awal SPP masih saja terus bergulir dan beredar di masyarakat, juga berdampak positif hingga saat ini.³

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri perdesaan di Kecamatan. UPK mendapat penugasan dari Musyawarah Antar Desa (MAD) dan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) untuk menjalankan program pendanaan sarana prasarana, baik pembangunan dan perguliran SPP.

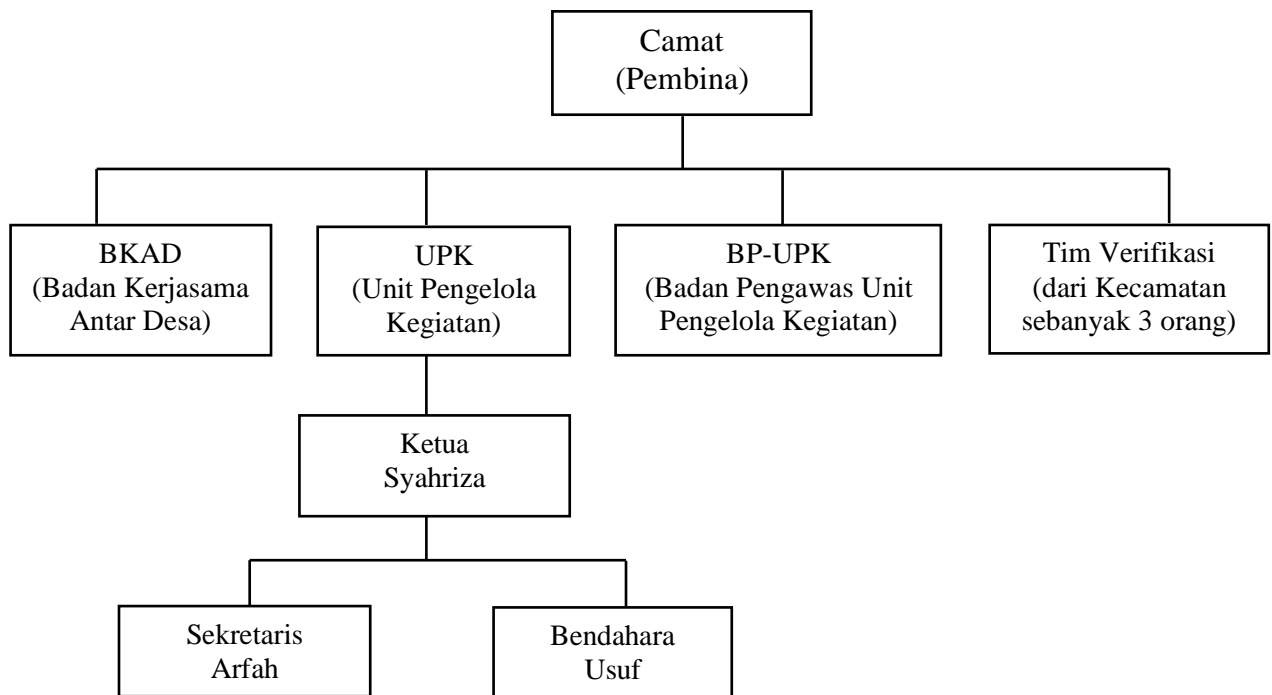
UPK Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu memiliki sekurang-kurangnya tiga (3) orang pengurus, yaitu: 1) Ketua, 2) Sekretaris, dan 3) Bendahara.

Adapun struktur kepengurusan UPK Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, yaitu:

²PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, h.2

³Arfah, Sekretaris UPK di PNPM-MPd Bilah Barat Kab. Labuhanbatu. Wawancara pada tanggal 03 Agustus 2020.

**Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan UPK di Kec. Bilah Barat
Kab. Labuhanbatu**



**b. Gambaran Umum dan Prosedur Simpan Pinjam Perempuan
(SPP)**

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan program PNPM Mandiri berupa modal usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin khususnya perempuan. SPP diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Rumah tangga Miskin (RTM), karena SPP ini menggunakan sistem tanggung renteng dengan pinjaman tanpa agunan dan juga dengan bunga yang lebih rendah yaitu 10% per tahun. SPP ini di kelola oleh Unit Pengelola kegiatan (UPK) yang merupakan kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dana bergulir. Mekanisme dana bergulir ini dengan pembayaran pinjaman dari setiap kelompok secara angsur setiap sebulan sekali selama setahun dan pinjaman yang telah dibayarkan kelompok akan di gulirkan kembali ke kelompok lainnya. Sering kali terjadi keterlambatan pengembalian uang pinjaman, sehingga terjadi piutang macet atau bahkan piutang tak tertagih. Hal ini sangat berpengaruh bagi kelompok yang akan menerima

pinjaman berikutnya jika kelompok lain tidak membayar pinjaman tepat waktu.

Sanksi bagi kelompok yang melakukan tunggakan pembayaran pinjaman sesuai dengan SOP UPK yaitu, besaran jumlah pinjaman berikutnya akan dibatasi dengan jumlah lebih kecil dari pinjaman sebelumnya. Akan tetapi, apabila kelompok tersebut terus-terusan melakukan tunggakan pembayaran pinjaman maka kelompok tersebut tidak akan diberikan pinjaman lagi oleh pihak UPK, karena hal ini akan menyebabkan terhambatnya dana perguliran ke kelompok lain.

Adapun ketentuan kelompok yang akan menerima SPP menurut ketentuan di UPK Bilah Barat, yaitu:

- 1) Anggota kelompok berdomisili di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- 2) Anggota kelompok merupakan perempuan yang perekonomiannya kurang mampu.
- 3) Anggota kelompok sudah dikenal dan mempunyai usaha untuk modal pinjaman, karena anggota juga harus dapat dipercaya bisa mengembalikan pinjaman tepat waktu.
- 4) Setiap kelompok harus terdiri dari 8-16 orang.
- 5) Memiliki pengurus kelompok yaitu: ketua, sekretaris dan bendahara.

Ada beberapa mekanisme dalam pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan di UPK Bilah Barat, yaitu:

- 1) Membuat Proposal oleh ketua kelompok sebagai syarat SPP yang berisikan identitas anggota, jenis usaha, dan besaran jumlah pinjaman dengan ketentuan pinjaman setiap anggota maksimal Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- 2) Menyerahkan Proposal kelompok kepada UPK Bilah Barat dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri, surat izin suami yang menerangkan bahwa istrinya melakukan SPP, dan pasphoto 3x4.

3) Membuat Surat Pernyataan Tanggung Renteng.

Setelah melakukan prosedur pinjaman di atas, tim verifikasi dari UPK Bilah Barat akan melakukan survei lapangan untuk menentukan kelayakan penerimaan pinjaman pertama dan penentuan besaran jumlah pinjaman sesuai dengan usahanya. Setelah memenuhi syarat kelayakan menerima pinjaman maka akan menunggu pengesahan dari Kepala Camat, kemudian setelah di sahkan maka akan dilakukan pencairan dana SPP. Pencairan dana dilakukan di tempat yang telah di sepakati oleh kelompok yang akan melakukan pencairan dana, dan di hadiri oleh kepala desa sebagai penanggungjawab kelompok di desa masing-masing dan harus dihadiri oleh seluruh anggota kelompok.

c. Ketentuan dan Pelaksanaan Pencairan Dana

Ketentuan pendanaan pencairan dana sesuai penjelasan aturan perguliran dan Standar Operasional Kegiatan (SOP) minimal memuat hal sebagai berikut:

- 1) Dana perguliran BLM dapat digunakan untuk kegiatan UEP dan SPP, sedangkan dana perguliran SPP digunakan hanya untuk kegiatan SPP.
- 2) Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.
- 3) Kelompok yang didanai merupakan kelompok simpan pinjam perempuan dan kelompok usaha bersama, kelompok aneka usaha dengan pemanfaatan RTM.
- 4) Kelompok peminjam dana harus mempunyai kategori kelompok berkembang atau siap.
- 5) Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok.
- 6) Adanya perjanjian pinjaman antara pihak UPK dan kelompok.
- 7) Jadwal angsuran disesuaikan dengan fungsi kelompok dan siklus usahanya.
- 8) Pembebasan jasa pinjaman sesuai dengan bunga pinjaman pasar di wilayah masing-masing.

- 9) Kelompok dapat diberikan Intensif Pengembalian Tepat Waktu (IPTW) sebagai stimulan.

Besaran dana pinjaman bagi kelompok yang baru berdasarkan SOP hanya Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per anggota, jadi jika anggota kelompok berjumlah 16 (enam belas) orang dana awal yang akan di cairkan hanya sebesar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) selama satu tahun. Kemudian untuk pengajuan pinjaman SPP pada tahun berikutnya, besaran dana pinjaman di tentukan berdasarkan kelancaran kelompok dalam pengembalian pinjaman SPP, maka kelompok dapat mengajukan pinjaman lebih dari pinjaman awal, dengan batasan pinjaman sesuai dengan ketentuan UPK di wilayah masing-masing.

d. Pelaksanaan Sistem Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng merupakan upaya pencegahan piutang macet dalam SPP. Tanggung renteng adalah simpanan dari setiap anggota kelompok yang di kelola oleh kelompok juga, dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh kelompok masing-masing. Tabungan tanggung renteng ini bertujuan untuk membantu anggota kelompok yang nantinya mengalami kesulitan membayar pinjaman saat jatuh tempo, sehingga akan di tanggulangi terlebih dahulu dari tabungan tanggung renteng tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari piutang macet yang dilakukan salah satu anggota kelompok, karena apabila terjadi piutang macet maka akan berdampak buruk kepada kelompok dalam besaran pengajuan piutang berikutnya. Tanggung renteng juga disebut dengan apabila salah satu anggota kelompok bermasalah dalam pembayaran, maka akan ditanggung bersama.

e. Proses Penyelesaian Piutang Menurut Pandangan Islam

- 1) Peminjam Wajib Melunasi Utang

Peminjam harus mengembalikan utangnya pada waktu atau setelah jatuh tempo sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 1, bahwa seseorang yang beriman diwajibkan oleh Allah untuk memenuhi

perjanjian akad-akad yang dibuatnya. Siapa yang berutang dengan niat melunasinya, niscaya Allah akan membantu melunasinya.⁴

2) Restrukturasi Utang dan Hapus Tagih Sisi Utang

Konsep mengenai restrukturasi dan hapus tagih dalam surah Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.⁵

Ayat tersebut sebagai tuntutan kepada orang yang beriman. Hanya orang yang beriman yang mau memberikan kelapangan kepada orang yang berutang. Dan alangkah baiknya jika orang yang berutang datang meminta maaf dan memohon diberi tempo, kemudian disambut oleh yang memberi utang dengan berkata: “utangmu itu telah aku lepaskan, engkau telah berutang lagi”. Ayat yang seperti inilah apabila kamu pikirkan, maka amat baik bagi dirimu sendiri. Sehingga dapat mengokohkan ukhuwah dengan yang diberi utang.⁶ Berdasarkan ayat diatas, maka untuk pelaksanaan atau prosedur penanganan dan penyelesaian piutang bermasalah dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

a) Memberi tangguh sampai peminjam berkelapangan

Pemberi pinjaman haruslah dermawan dalam memberi perpanjangan waktu pelunasan jika peminjam dalam kesulitan dan tak dapat memenuhi kewajibannya. Tindakan seperti ini merupakan kewajiban yang amat besar dan dijanjikan mendapat pahala dari Allah setiap hari

⁴Muhammad bin Ismail Al-Shan’ani, *SubulusSalam Syarah Bulughul Maram*, Penerj. Ali Nur Medan, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), h.431.

⁵Al-Jumānatul ‘Alī, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*Departemen Agama RI, (Bandung: J-Art, 2004), h.47.

⁶Hamka, *Tafsir al azhar* Juz III, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003), h.104.

hingga utang tersebut dilunasi.⁷ Dengan penangguhan atau penjadwalan pembayaran kewajiban tersebut diharapkan peminjam mempunyai kemampuan membayar kembali kewajibannya sehingga dapat melunasi semua utangnya. Jadi pemberi pinjaman hanya memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran utang sampai peminjam berkelapangan. Dengan demikian penangguhan pembayaran utang dilakukan dengan cara membuat penjadwalan kembali *rescheduling*.

b) Menyedekahkan sebagian utang peminjam

Apabila setelah diberikan penangguhan kemudian peminjam tetap tidak bisa atau mampu melunasi utang tersebut, maka pemberi pinjaman dapat menyedekahkan piutangnya kepada peminjam. Bagi seorang muslim menyedekahkan piutangnya adalah lebih baik. Dalam Al-qur'an tidak menjelaskan besar kecilnya suatu jumlah piutang yang boleh untuk disedekahkan. Karena itu, besar kecilnya jumlah piutang yang akan disedekahkan tergantung pada kerelaan pihak pemberi pinjaman hartanya tersebut kepada peminjam. Apabila yang disedekahkan hanya sebagian dari utangnya, maka peminjam berkewajiban untuk melunasi utangnya kepada pemberi pinjaman.

c) Menyedekahkan seluruh sisa utang peminjam

Apabila peminjam setelah diberikan kedua tahap tersebut masih dianggap tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka terhadap seluruh sisa utang peminjam dapat disedekahkan.

3) Pengalihan Piutang

Pengalihan utang dapat dilakukan oleh pemberi pinjaman yang tidak mampu kepada peminjam yang mampu. Hal ini adalah sebagai salah satu bentuk penyelesaian utang piutang dalam islam yang dapat dilakukan berdasarkan hadis yang artinya:

“Rasulullah Saw bersabda: Menunda-nunda pembayaran utang seseorang (padahal dia mampu membayarnya) adalah perbuatan zalim.

⁷Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.250.

Dan apabila seseorang diantara kamu mengalihkan piutang kepada orang yang mampu membayarnya, terimalah cara demikian itu". (HR. Muslim)⁸

Hadis di atas berseru kepada orang-orang yang berutang, bahwasanya apabila menunda utang bagi yang mampu membayar utang itu adalah sebuah kedzaliman. Tetapi apabila tidak dapat membayar utang karena keadaan yang susah, maka apabila dialihkan utangnya kepada orang yang lebih mampu, sebagai orang yang berutang maka terimalah keputusan tersebut.

Dari beberapa cara penyelesaian piutang di atas berdasarkan pandangan Islam, bahwa hendaklah peminjam berniat membayarnya tepat waktu, namun jika ia tidak mampu, pemberi pinjaman dapat memberi keringanan waktu dengan memperpanjang waktu pembayaran dari perjanjian sebelumnya, jika peminjam tetap tidak mampu membayar, pemberi pinjaman dapat menyedekahkan setengah bahkan seluruh pinjamannya, jika pemberi pinjaman tidak bisa melakukan hal tersebut utang juga bisa dialihkan kepada ahli waris peminjam yang mampu.

B. Pembahasan

1. Analisis Kolektibilitas Piutang pada UPK Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu

a. Kolektibilitas Berdasarkan Saldo Pinjaman

Kolektibilitas merupakan penggolongan kredit berdasarkan cepat atau lambatnya pembayaran kredit, penggolongan ditujukan untuk melihat bagaimana kualitas kredit yang diberikan, sehingga bank atau lembaga non bank dapat mengetahui dan mengantisipasi risiko kerugian akibat piutang bermasalah. Kolektibilitas kredit digolongkan menjadi 5 (lima), yaitu:

- 1) Lancar (L)
- 2) Dalam Perhatian Khusus (DPK)
- 3) Kurang Lancar (KL)

⁸Al-Hafizh Zaki Al-din ‘Abd Al-‘Azhim Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, h.250.

4) Diragukan (D)

5) Macet (M)

Berikut tabel kolektibilitas berdasarkan saldo pinjaman UPK Bilah Barat tahun 2016 s/d 2018.

Tabel 4.1 Kolektibilitas Berdasarkan Saldo Pinjaman UPK Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu

No	Klasifikasi	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Kolektibilitas I/L	94,990,000	117,849,000	138,375,000
2	Kolektibilitas II/DPK	53,324,000	38,842,000	27,242,000
3	Kolektibilitas III/KL	83,531,000	94,228,000	119,929,000
4	Kolektibilitas IV/D	164,166,000	163,366,000	124,293,000
5	Kolektibilitas V/M	-	-	-
Total Saldo Pinjaman		396,011,000	414,285,000	409,839,000

Sumber: Laporan Keuangan UPK Bilah Barat

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan kolektibilitas berdasarkan saldo pinjaman UPK Bilah Barat pada tahun 2016 kolektibilitas I/L Rp94.990.000, kolektibilitas II/DPK Rp53.324.000, kolektibilitas III/KL Rp83.531.000, kolektibilitas IV/D Rp164.166.000 dan tidak ada kolektibilitas V/M yang dalam pengertiannya tidak mengembalikan pinjaman sampai 180 hari keatas pada tahun 2016, adapun total saldo pinjaman Rp396.011.000. Kemudian pada tahun 2017 dengan kolektibilitas I/L Rp117.849.000, kolektibilitas II/DPK Rp38.842.000, kolektibilitas III/KL Rp94.228.000, kolektibilitas IV/D Rp163.366.000 dan di tahun 2017 juga tidak ada kolektibilitas saldo pinjaman V/M, adapun total saldo pinjaman sebesar Rp414.285.000. Terakhir pada tahun 2018 kolektibilitas I/L Rp138.375.000, kolektibilitas II/DPK Rp27.242.000, kolektibilitas III/KL Rp119.929.000, kolektibilitas IV/D Rp124.293.000 dan sampai tahun 2018 ini belum ada golongan saldo pinjaman dengan kolektibilitas V/M, adapun total saldo pinjaman Rp409.839.000.

b. Penggolongan Kolektibilitas Kredit Selama 3 Tahun Terakhir

Berikut merupakan data kolektibilitas kredit SPP UPK Bilah Barat selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 4.2 Data Penggolongan Kolektibilitas UPK Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu Tahun 2016 s/d 2018

No	Klasifikasi	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Kolektibilitas I/L	94,990,000	117,849,000	138,375,000
2	Kolektibilitas II/DPK	53,324,000	38,842,000	27,242,000
3	Kolektibilitas III/KL	83,531,000	94,228,000	119,929,000
4	Kolektibilitas IV/D	164,166,000	163,366,000	124,293,000
5	Kolektibilitas V/M	-	-	-

Sumber: Laporan Keuangan UPK Bilah Barat

Berdasarkan data kolektibilitas UPK Bilah Barat 3 (tiga) tahun terakhir di atas bahwa kolektibilitas I/L selalu mengalami kenaikan, yaitu dari tahun 2016 Rp94.990.000, tahun 2017 Rp117.849.000 dan tahun 2018 Rp138.375.000. Kemudian kolektibilitas II/DPK mengalami penurunan tiap 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp53.324.000, tahun 2017 Rp38.842.000 dan tahun 2018 Rp27.242.000. Adapun kolektibilitas III/KL di tahun 2016 sebesar Rp83.531.000, kemudian mengalami kenaikan sebesar Rp94.228.000 pada tahun 2017 dan Rp119.929.000 di tahun 2018. Pada kolektibilitas IV/D mengalami penurunan di tahun 2016 Rp164.166.000, tahun 2017 Rp163.366.000 dan tahun 2018 Rp124.293.000. Untuk kolektibilitas V/M belum ada penggolongan pinjaman SPP UPK Bilah Barat pada tahun 2016 s/d 2018.

c. Rasio Kredit Berdasarkan Data Kolektibilitas

Berikut perhitungan rasio kredit terhadap total kredit berdasarkan data kolektibilitas dari tahun 2016 s/d 2018.

1) Rasio Kredit Lancar

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} & \quad \frac{94,990,000}{396,011,000} \times 100\% = 23,98\% \\ \text{Tahun 2017} & \quad \frac{117,849,000}{414,285,000} \times 100\% = 28,44\% \end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2018} \quad \frac{138,375,000}{409,839,000} \times 100\% = 33,76\%$$

Dari hasil perhitungan rasio kredit lancar terhadap total kredit oleh UPK Bilah Barat diketahui mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 23,98%, tahun 2017 28,44% dan di tahun 2018 sebesar 33,76%.

2) Rasio Kredit Dalam Perhatian Khusus

$$\text{Tahun 2016} \quad \frac{53,324,000}{396,011,000} \times 100\% = 13,46\%$$

$$\text{Tahun 2017} \quad \frac{38,842,000}{414,285,000} \times 100\% = 9,37\%$$

$$\text{Tahun 2018} \quad \frac{27,242,000}{409,839,000} \times 100\% = 6,64\%$$

Rasio kredit dalam perhatian khusus dari hasil perhitungan di atas yaitu tahun 2016 sebesar 13,46% dan mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 9,37%, tahun 2018 6,64%.

3) Rasio Kredit Kurang lancar

$$\text{Tahun 2016} \quad \frac{83,531,000}{396,011,000} \times 100\% = 21,09\%$$

$$\text{Tahun 2017} \quad \frac{94,228,000}{414,285,000} \times 100\% = 22,74\%$$

$$\text{Tahun 2018} \quad \frac{119,929,000}{409,839,000} \times 100\% = 29,26\%$$

Hasil perhitungan rasio kredit kurang lancar di atas mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 21,09%, tahun 2017 22,74% dan tahun 2018 29,26%.

4) Rasio Kredit Diragukan

$$\text{Tahun 2016} \quad \frac{164,166,000}{396,011,000} \times 100\% = 41,45\%$$

$$\text{Tahun 2017} \quad \frac{163,366,000}{414,285,000} \times 100\% = 39,43\%$$

$$\text{Tahun 2018} \quad \frac{124,293,000}{409,839,000} \times 100\% = 30,32\%$$

Besarnya rasio kredit diragukan dari hasil perhitungan di atas yaitu tahun 2016 sebesar 41,45% kemudian mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 39,43% dan tahun 2018 30,32%.

5) Rasio Kredit Macet

Untuk rasio kredit macet tidak ada perhitungannya karena tidak ada dalam data kolektibilitas V/M (macet) SPP UPK Bilah Barat.

Dari hasil perhitungan rasio kredit pada masing-masing kategori kolektibilitas di atas maka dapat disajikan dalam tabel rasio kolektibilitas tahun 2016 s/d 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Rasio Kolektibilitas Kredit Terhadap Total Kredit Tahun 2016 s/d 2018

Tahun	Kolektibilitas (%)				
	L	DPK	KL	D	M
2016	23,98%	13,46%	21,09%	41,45%	-
2017	28,44%	9,37%	22,74%	39,43%	-
2018	33,76%	6,64%	29,26%	30,32%	-
Total	86,18%	29,47%	73,09%	111,20%	-
Rata-rata	28,72%	9,82%	24,36%	37,00%	-

Sumber: Data diolah

Hasil perhitungan dari analisis rasio kolektibilitas kredit di atas kemudian di sajikan dalam bentuk tabel selama tahun 2016 s/d 2018, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kredit lancar mengalami kenaikan dari tahun 2016 s/d 2018

- 2) Kredit dalam perhatian khusus mengalami penurunan dari tahun 2016 s/d 2018
- 3) Kredit kurang lancar mengalami kenaikan dari tahun 2016 s/d 2018
- 4) Kredit diragukan mengalami penurunan dari tahun 2016 s/d 2018
- 5) Dalam kredit macet tidak ada data.

2. Perhitungan NPL (*NonPerforming Loan*)

Untuk piutang yang dikategorikan bermasalah yaitu kredit Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M). Berikut ini adalah data *NonPerforming Loan* (NPL) dari tahun 2016 s/d 2018.

Tabel 4.4 Data *NonPerforming Loan* SPP UPK Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 s/d 2018

No	Tahun	Kategori <i>NonPerforming Loan</i> (NPL)		
		Kolektibilitas III/KL	Kolektibilitas IV/D	Kolektibilitas V/M
1	2016	83,531,000	164,166,000	-
2	2017	94,228,000	163,366,000	-
3	2018	119,929,000	124,293,000	-
Total		297,688,000	451,825,000	-

Sumber: Data diolah

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kolektibilitas III/KL mengalami kenaikan, dan kolektibilitas IV/D mengalami penurunan dari 3 (tiga) tahun terakhir, untuk kolektibilitas V/D tidak ada data untuk kategori ini. Untuk menghitung rasio kredit NPL menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NPL = \frac{KL + D + M}{\text{Kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Berikut ini perhitungan menggunakan rumus di atas disajikan dalam bentuk tabel kolektibilitas kredit kategori KL, D dan M.

**Tabel 4.5 Total Kredit Kategori KL, D dan M SPP UPK Kec.
Bilah Barat Kab. Labuhanbatu Tahun 2016 s/d 2018**

Kategori NPL	Tahun		
	2016	2017	2018
Kurang Lancar	83,531,000	94,228,000	119,929,000
Diragukan	164,166,000	163,366,000	124,293,000
Macet	-	-	-
Total KL, D, M	247,697,000	257,594,000	244,222,000
Total Pinjaman	396,011,000	414,285,000	409,839,000

Sumber: Data diolah

- 1) Perhitungan NPL berdasarkan kategori kolektibilitas pada tahun 2016

$$\text{NPL} = \frac{247,697,000}{396,011,000} \times 100\% = 62,54\%$$

Jadi, besarnya NPL berdasarkan kolektibilitas pada tahun 2016 yaitu, 62,54%.

- 2) Perhitungan NPL berdasarkan kategori kolektibilitas pada tahun 2017

$$\text{NPL} = \frac{257,594,000}{414,285,000} \times 100\% = 62,17\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, untuk NPL berdasarkan kategori kolektibilitas KL, D dan M pada tahun 2017 adalah 62,17%.

- 3) Perhitungan NPL berdasarkan kategori kolektibilitas pada tahun 2018

$$\text{NPL} = \frac{244,222,000}{409,839,000} \times 100\% = 59,58\%$$

NPL berdasarkan kategori kolektibilitas tahun 2018 adalah 59,58%.

Setelah diketahui rasio NPL berdasarkan kategori kolektibilitas KL, D dan M maka dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 4.6 Hasil Perhitungan *NonPerforming Loan*
SPP UPK Bilah Barat Tahun 2016 s/d 2018**

Tahun	<i>NonPerforming Loan (%)</i>	Pertumbuhan (%)
2016	62,54%	-
2017	62,17%	0,37%
2018	59,58%	2,59%
Rata-rata	61,43%	

Sumber: Data diolah

Berdasarkan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa NPL selama 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2016 s/d 2018 mengalami penurunan, dari tahun 2016 sebesar 62,54% menjadi 62,17% pada tahun 2017 dengan pertumbuhan 0,37% dan menurun lagi di tahun 2018 sebesar 59,58% dengan pertumbuhan 2,59%.

Setelah melakukan perhitungan-perhitungan rasio kolektibilitas kredit di atas, maka untuk langkah yang terakhir melakukan analisa kolektibilitas kredit selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sebagai berikut ini.

Tabel 4.7 Analisa Data Kolektibilitas SPP UPK Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu Tahun 2016 s/d 2018

Tahun	Kolektibilitas (%)					NPL
	L	DPK	KL	D	M	
2016	23,98%	13,46%	21,09%	41,45%	-	62%
2017	28,44%	9,37%	22,74%	39,43%	-	62%
2018	33,76%	6,64%	29,26%	30,32%	-	60%
Total	86,18%	29,47%	73,09%	111,20%	-	184%
Rata-rata	28,72%	9,82%	24,36%	37,00%	-	61%

Sumber: Data diolah

Hasil analisa data kolektibilitas SPP UPK Bilah Barat periode tahun 2016 s/d 2018 pada tabel di atas menunjukkan persentase rata-rata kolektibilitas kategori lancar sebesar 28,72%, dalam perhatian khusus 9,82%, kurang lancar 24,36%, diragukan 37,00% dan kolektibilitas kategori macet tidak ada.

Adapun untuk analisis NPL rata-rata dari tahun 2016 s/d 2018 sebesar 61%. Menurut ketentuan Bank Indonesia jika persentase NPL nya melebihi dari 5% maka akan mempengaruhi nilai kesehatan bank. Untuk penaksiran klasifikasinya adalah:

- 1) Risiko rendah (*low*) jika persentase dibawah 5%
- 2) Risiko sedang (*moderat*) jika persentase pada angka 5-10%
- 3) Risiko tinggi (*high*) jika persentase diatas 10%

Dilihat dari penaksiran klasifikasi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengendalian *intern* piutang SPP UPK Bilah Barat berdasarkan persentase rata-rata NPL dari tahun 2016 s/d 2018 di kategorikan risiko tinggi karna persentase rata-rata NPL dari tahun 2016 s/d 2018 melebihi 10% yaitu 61%. Meskipun jika dilihat pada persentase nilai NPL dari tahun 2016 s/d 2018 mengalami penurunan, tetapi tetap saja NPL nya masih saja tinggi. Pengendalian *intern* piutang pada SPP UPK Bilah Barat masih kurang baik dalam mengurangi risiko piutang macet.

3. Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang yang Diterapkan Oleh UPK Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu

Piutang macet atau piutang bermasalah merupakan hal yang umum terjadi di lembaga keuangan perbankan maupun nonbank, untuk itu perlu dilakukan pengendalian *intern* piutang secara efektif. Pengendalian *intern* piutang dilakukan sebelum piutang diberikan kepada nasabah seperti pengajuan piutang, persetujuan piutang, pencairan dana, sampai pengembalian piutang.

Sebagaimana pernyataan di atas, peneliti telah melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian *intern* piutang yang diterapkan di UPK Bilah Barat, adapun hasil wawancara dengan pihak UPK Bilah Barat adalah sebagai berikut:

*“Sistem yang digunakan di PNPM-Mandiri bagian SPP Bilah Barat ini yaitu sistem tanggung renteng, maksudnya setiap kelompok menyimpan atau menabung uang dengan mekanisme aturan dalam mengelola tabungan tersebut hanya kelompok itu sendiri yang mengelola nya. Gunanya ketika nanti ada anggota dalam kelompok tersebut yang tidak mampu membayar, maka akan dibayarkan dahulu menggunakan uang tabungan tersebut atau ini disebut tanggung renteng.”*⁹

⁹Syahriza, Ketua di UPK PNPM-MPd Bagian SPP, Wawancara di Kantor PNPM-MPd SPP Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, Tanggal 10 Maret 2020.

Kemudian untuk setiap bulannya, pihak UPK Bilah Barat menerima setoran angsuran dari ketua kelompok sampai hitungan satu tahun, dari angsuran tersebut akan di gulirkan kembali kepada kelompok lainnya sehingga berpengaruh jika kelompok lain tidak membayar tepat waktu.

Dalam pengajuan piutang yang diterapkan oleh UPK Bilah Barat harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

*“Syarat untuk mengajukan pinjaman SPP di UPK Bilah Barat yaitu, membuat proposal yang didalam proposal tersebut identitas anggota kelompok, jenis usaha dan besaran jumlah pinjaman yang akan diajukan. Kemudian mempunyai KTP, baik KTP istri dan juga suami, membuat surat pernyataan bahwa suami mengizinkan istrinya melakukan SPP ini, pasphoto 3x4 dan yang terakhir membuat surat pernyataan tanggung renteng.”*¹⁰

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam pengajuan piutang di PNPM-Mandiri bagian SPP mudah dan tidak rumit, tetapi masih banyak saja kelompok yang melakukan tunggakan pembayaran. Hal ini terjadi karena beberapa faktor menurut ketua UPK Bilah Barat sebagai berikut:

*“Ada beberapa faktor seperti kendala pada usaha anggota kelompok, karna mengalami rugi dari usaha nya atau bahkan ada juga yang sampai bangkrut, tetapi tak jarang juga ternyata ada anggota yang tidak menggunakan modal pinjaman SPP ini untuk modal usaha, jadi akan terasa sulit dalam pengembalian pinjaman.”*¹¹

Untuk sanksi yang diberikan bagi kelompok yang melakukan tunggakan berupa pembatasan jumlah pinjaman bahkan sampai diberhentikan pinjaman nya jika memang tidak bisa lagi di maklumi.

“Jika kelompok melakukan tunggakan maka akan diberikan sanksi ringan dengan membatasi pinjaman atau pinjaman akan lebih sedikit dari

¹⁰*Ibid.,*

¹¹*Ibid.,*

jumlah maksimum namun jika masih bandel pinjaman tidak akan diberikan lagi.”¹²

Untuk itu pihak UPK selalu memberikan pinjaman SPP ini dengan sangat berhati-hati, pihak UPK melakukan kebijakan-kebijakan untuk meyakinkan para kelompok untuk membayar pinjamannya. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak UPK Bilah Barat untuk mengurangi risiko piutang macet seperti penuturan dari ketua kelompok UPK Bilah Barat sebagai berikut:

“Tahapan pertama dengan memberi peringatan kepada kelompok melalui ketua kelompok, baik melalui telepon ataupun surat, tahapan kedua dengan melakukan kunjungan personal, tahapan yang ketiga dengan mengadakan musyawarah dengan kelompok beserta di dampingi kepala desa untuk dibicarakan secara baik-baik, dan tahapan yang terakhir dengan tindakan hukum.”¹³

Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas, Hasil perhitungan dari analisis rasio kolektibilitas total kredit selama tahun 2016 s/d 2018, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kredit lancar mengalami kenaikan dari tahun 2016 s/d 2018
- b. Kredit dalam perhatian khusus mengalami penurunan dari tahun 2016 s/d 2018
- c. Kredit kurang lancar mengalami kenaikan dari tahun 2016 s/d 2018
- d. Kredit diragukan mengalami penurunan dari tahun 2016 s/d 2018
- e. Dalam kredit macet tidak ada data.

Adapun untuk analisis NPL rata-rata dari tahun 2016 s/d 2018 sebesar 61%. Menurut ketentuan Bank Indonesia jika persentase NPL nya

¹²Arfah, Sekretaris di UPK PNPM-MPd Bagian SPP, Wawancara di Kantor PNPM-MPd SPP Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, Tanggal 03 Agustus 2020.

¹³Syahriza, Ketua di UPK PNPM-MPd Bagian SPP, Wawancara di Kantor PNPM-MPd SPP Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, Tanggal 10 Maret 2020

melebihi dari 5% maka akan mempengaruhi nilai kesehatan bank. Untuk penaksiran klasifikasinya adalah:

- a. Risiko rendah (*low*) jika persentase dibawah 5%
- b. Risiko sedang (*moderat*) jika persentase pada angka 5-10%
- c. Risiko tinggi (*high*) jika persentase diatas 10%

diketahui bahwa dilihat dari penaksiran klasifikasi analisis data kolektibilitas periode 2016 s/d 2018, bahwa pengendalian *intern* piutang SPP UPK Bilah Barat berdasarkan persentase rata-rata NPL dari tahun 2016 s/d 2018 di kategorikan risiko tinggi karna persentase rata-rata NPL dari tahun 2016 s/d 2018 melebihi 10% yaitu 61%. Meskipun jika dilihat pada persentase nilai NPL dari tahun 2016 s/d 2018 mengalami penurunan, tetapi tetap saja NPL nya masih saja tinggi. Pengendalian *intern* piutang pada SPP UPK Bilah Barat masih kurang baik dalam mengurangi risiko piutang macet.

Efektivitas adalah keberhasilan suatu pertanggungjawaban terhadap tercapai tidaknya suatu sasaran yang telah ditetapkan, ketika kontribusi yang dihasilkan semakin mendekati sasaran tersebut, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Oleh karena itu, penulis menganalisa bagaimana efektivitas penerapan sistem pengendalian piutang oleh UPK SPP Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

- a. Efektivitas berdasarkan rasio perhitungan kolektibilitas

Berdasarkan analisis rasio perhitungan kolektibilitas dari laporan pinjaman kolektibilitas UPK Bilah Barat tahun 2016 s/d 2018 rata-rata persentase untuk kategori kolektibilitas lancar sebesar 28,72% dan untuk rata-rata persentase NPL 61%, berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia jika persentase NPL nya melebihi 10% maka termasuk dalam kategori risiko tinggi (*high*). Jadi untuk pengelolaan SPP di UPK Bilah Barat masih belum efektif.

- b. Efektivitas berdasarkan rasio perhitungan kolektibilitas

Berdasarkan analisis rasio perhitungan kolektibilitas dari laporan pinjaman kolektibilitas UPK Bilah Barat tahun 2016 s/d 2018 rata-rata persentase untuk kategori kolektibilitas lancar sebesar 28,72% dan untuk rata-

rata persentase NPL 61%, berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia jika persentase NPL nya melebihi 10% maka termasuk dalam kategori risiko tinggi (*high*). Jadi untuk pengelolaan SPP di UPK Bilah Barat masih belum efektif.

c. Efektivitas berdasarkan sistem pengendalian yang digunakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPK Bilah Barat bahwa sistem pengendalian piutangnya yang diterapkan yaitu sistem tanggung renteng. Dalam mengajukan pinjaman juga tidak sulit, karna pinjaman tidak memerlukan jaminan hanya dengan saling kenal dan percaya saja, persyaratan-persyaratan dan mekanisme pengajuan piutang juga mudah dilakukan. Dana bergulir yang di praktekkan sangat baik dalam menjaga keberlangsungan piutang, dan berdasarkan hasil analisis pada sistem pengendalian *intern* piutang prosedur/mekanisme yang diterapkan sudah sesuai SOP.

pengelompokan piutang berdasarkan jatuh temponya adalah sebagai berikut (sebagai contoh jatuh tempo yang terjadi 60 hari):

- a. Piutang standar, yaitu piutang yang masih bisa tertagih karena dalam kurun waktu jatuh tempo yang masih berjalan (< 60 hari).
- b. Piutang jatuh tempo, yaitu kondisi piutang yang sudah jatuh tempo dan harus terjadi penagihan (60 hari).
- c. Piutang *over due*, yaitu kondisi piutang yang melebihi batas jatuh tempo, namun masih bisa ditolerir dengan alasan yang bisa diterima perusahaan (60 hari + 30 hari).
- d. Piutang over limit, yaitu kondisi piutang yang sangat melebihi batas maksimal jatuh tempo dan melebihi tingkat fleksibilitas jatuh tempo (> 90 hari).
- e. Piutang yang tak tertagih, yaitu kondisi piutang yang benar-benar tidak bisa tertagih dengan baik (365 hari)³.

³Hengki Irawan Setia Budi, SE, *Bijak Mengelola Piutang (Smart In Account Receivable)*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), h.7-8.

Piutang biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30 hari sampai 60 hari. Dampak dari pemberian piutang ini, nantinya dapat menyebabkan munculnya piutang macet atau bermasalah. Penyebab piutang macet bisa terjadi dari segi pemilik piutang karena kurangnya usaha penagihan, kurangnya kontrol dari pemberi piutang, kurangnya analisis seleksi dalam pemberian kredit, sedangkan dari segi pihak yang berutang penyebabnya bisa bermacam-macam, misalnya pihak yang berutang tiba-tiba mengalami kesulitan keuangan, kebangkrutan usaha atau pihak yang berutang memang mempunyai motif secara sengaja tidak membayar utangnya.

Allah akan melipatgandakan balasan yang banyak bagi orang yang memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Dalam hal ini dimaksudkan adalah pinjaman yang baik.

Di dalam hadis dikatakan kepada orang-orang yang berutang, bahwasanya apabila menunda utang bagi yang mampu membayar utang itu adalah sebuah kedzaliman. Tetapi apabila tidak dapat membayar utang karena keadaan yang susah, maka apabila dialihkan utangnya kepada orang yang lebih mampu, sebagai orang yang berutang maka terimalah keputusan tersebut.

Dari beberapa cara penyelesaian piutang dalam ajaran Islam, bahwa hendaklah peminjam berniat membayarnya tepat waktu, namun jika ia tidak mampu, pemberi pinjaman dapat memberi keringanan waktu dengan memperpanjang waktu pembayaran dari perjanjian sebelumnya, jika peminjam tetap tidak mampu membayar, pemberi pinjaman dapat menyedekahkan setengah bahkan seluruh pinjamannya, jika pemberi pinjaman tidak bisa melakukan hal tersebut utang juga bisa dialihkan kepada ahli waris peminjam yang mampu.

Di samping dari pernyataan di atas, Allah dan rasul juga melaknat bagi siapa saja yang melakukan transaksi riba. PNPM Mandiri bagian SPP (Simpan Pinjam Perempuan) di Bilah Barat menerapkan sistem riba dalam

program ini, karena SPP ini menerapkan sistem bunga kredit sebesar 10% pertahunnya.

Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an surah Ali Imran ayat 130 tentang riba sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”¹⁴

Allah sangat melarang keras praktik riba, dalam Al-qur'an terdapat banyak ayat-ayat Allah tentang haram tidak bolehnya praktik riba. Begitu juga dengan Rasulullah dalam hadis berikut:

“Dari Jabir r.a. berkata, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya, dan dua saksinya, dan Beliau berkata, mereka semua adalah sama.” (HR. Muslim)

Hadis di atas menggambarkan mengenai bahaya dan buruknya riba bagi kehidupan kaum Muslimin. Begitu buruk dan bahayanya riba, sehingga digambarkan bahwa Rasulullah SAW melaknat seluruh pelaku riba. Pemakannya, pemberinya, pencatatnya maupun saksi-saksinya. Semua golongan yang terkait dengan riba tersebut dikatakan oleh Rasulullah SAW: “Mereka semua adalah sama.” Pelaknatan Rasulullah SAW terhadap para pelaku riba menggambarkan betapa mungkarnya perbuatan riba, mengingat Rasulullah SAW tidak pernah melaknat suatu keburukan, tetapi keburukan tersebut membawa kemudharatan yang luar biasa, baik dalam skala individu bagi para pelakunya maupun masyarakat secara luas. Oleh karenanya, setiap

¹⁴ Al-Jumānatul ‘Alī, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, (Bandung: J-Art, 2004), h.66.

muslim wajib menghindarkan diri dari praktik riba dalam segenap aspek kehidupannya.¹⁵

Meskipun memberikan piutang merupakan niat yang baik dalam meringankan perekonomian seseorang, tetapi alangkah baiknya jika menolong kesulitan itu dengan bersedekah dan piutang tanpa bunga atau hal-hal yang melibatkan praktik riba.

¹⁵Isnaini Harahap, dkk., *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 190-191.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Rata-rata persentase kolektibilitas piutang selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 s/d 2018 dalam kategori kolektibilitas lancar sebesar 28,72%, kolektibilitas dalam perhatian khusus 9,82%, kolektibilitas kurang lancar 24,36%, kolektibilitas dikhususkan 37,00% dan tidak ada data kolektibilitas untuk kategori macet karna sampai tahun 2018 belum ada kelompok yang melakukan tunggakan selama lebih dari 180 hari.
2. Rata-rata persentase untuk *NonPerforming Loan* sebesar 61%. Dalam ketentuan Bank Indonesia NPL SPP UPK Bilah Barat ini termasuk dalam kategori risiko tinggi (*high*) karna melebihi 10%. Hal ini menunjukkan belum efektif nya pengelolaan piutang di UPK Bilah Barat.
3. Sistem pengendalian *intern* piutang yang diterapkan UPK Bilah Barat yaitu sistem tanggung renteng. Sistem tanggung renteng merupakan bentuk tanggungjawab dalam kelompok, yang mana jika dalam kelompok ada anggota yang tidak mampu membayar pinjaman pada waktu jatuh tempo pembayaran dilakukan terlebih dahulu dari dana tanggung renteng ini, dalam artian jika ada kelompok yang bermasalah, satu kelompok menanggung risiko bersama. Hal ini dilakukan untuk mencegah kredit macet.

B. Saran

Berdasarkan dari informasi dan hasil penelitian yang diperoleh, saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi rata-rata persentase kolektibilitas selama tahun 2016 s/d 2018 yang cukup tinggi, pihak UPK Bilah Barat dapat

melakukan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif agar para anggota kelompok tidak sepele dalam membayar utangnya.

2. Dalam menangani nilai *NonPerforming Loan*, pihak UPK lebih menguatkan hukum dalam pinjaman SPP ini, karena selama ini anggota kelompok masih sepele dalam melakukan pembayaran SPP yang menunggak.
3. Kemudahan dalam melakukan pinjaman tanpa agunan pinjaman memang baik bagi kelompok, dan sanksi-sanksi yang diberikan masih kurang tegas, karena hal ini para kelompok menganggap remeh jika melakukan tunggakan. Jadi saran dari peneliti agar penguatan hukum dan sanksi dalam pinjaman SPP di UPK Bilah Barat untuk menghindari kesepelean anggota kelompok dalam mengembalikan pinjaman dan mengurangi piutang macet nya. Perlunya melakukan sistem pengendalian piutang sesuai dengan pengendalian internal piutang yang berlaku. Pihak pengelola UPK Bilah Barat juga harus mempertahankan sistem tanggung renteng ini. Karena program SPP ini masih tetap berlangsung meskipun PNPM-Mandiri sudah diberhentikan sejak tahun 2014 tapi program SPP ini masih tetap berjalan karena piutang masih beredar dan program SPP ini dianggap program yang sangat baik dalam membantu perekonomian rumah tangga miskin terkhususnya ibu-ibu hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ali, Al-jumānatul, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, Bandung: J-Art, 2004.
- Al-Mundziri, Al-Hafizh Zaki Al-Din, *Mukhtashar Shahih Muslim*.
- Al-Shan’ani, Muhammad bin Ismail, *SubulusSalam Syarah Bulughul Maram*, Penerj. Ali Nur Medan, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008.
- Bodnar dan Hopwood, *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta: Andi, 2006.
- Chaudry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati, *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2011.
- Gondodiyoto, Sanyoto, *Audit Sistem Informasi*, Jakarta: Mitra Wicana Media, 2007.
- Gondodiyoto, Sanyoto, *Audit Sistem Informasi Lanjutan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007.
- Halim, Abdul, *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Hamka, *Tafsir al azhar* Juz III, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003.
- Hanum, Sefrida, et. Al., *Sistem Informasi Akuntansi*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2015.
- Harahap, Isnaini, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Haryono, *Dasar-Dasar Akuntansi*, Yogyakarta: YKPN, 2005.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hery, *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Irawan, Hengki Setia Budi, *Bijak Mengelola Piutang Smart In Accounting Receivable*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Istiningsih, *Analisis Kolektibilitas Kredit Pada PD. BPR BKK Purworejo Cabang Bayan*, Jurnal.

- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Labuhanbatu, Kabupaten BPS, *Kecamatan Bilah Barat Dalam Angka 2019*.
- M. Reeve, James, dkk, *Pengantar Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Marshall B., Romney, dkk, *Sistem Informasi Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Prastiwi, Destiana Restu, *Analisis Pengendalian Intern Sistem Pemberian Kredit Berbasis COSO Studi Kasus di BPR Chandra Muktiartha*, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2007, Skripsi.
- Sanusi, A, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Setiawan, Iwan, *Akuntansi keuangan Menengah (Intermediate Accounting)*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Singleton, Hall, *Audit Teknologi Informasi dan Assurance*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Suryanto, Tulus, Internal control, Discipline of Its Impact On Employee Performance, *Prsoseding Seminar Bisnis & Teknologi ISSN*, Lampung, 2014.
- Syakur, Ahmad Syafi'i, *Intermediate Accounting*, Jakarta: AV Publisher, 2009.
- Tarigan, Azhari Akmal, dkk., *Metodologi Penelitian Islam*, Medan: La-Tansa Press, 2011.
- www.pnpm-mandiri.org
- Yuliana, Ena, *Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pengawasan Piutang Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kecamatan Tambang*, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012, Skripsi.

LAMPIRAN

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERDESAAN

UNIT PENGELOLA KEGIATAN

LAPORAN KOLEKTIBILITAS PINJAMAN SPP

Per Desember 2016

KEC. BILAH BARAT, KAB. LABUHANBATU, PROV. SUMATERA UTARA

NO	Kelompok / Desa	Saldo Pinjaman Bulan Ini (Kolom 13 Laporan perkembangan Pinjaman SPP)	Angsuran Pokok lancar (Tanpa tunggakan)	Angsuran Pokok Menunggak 1 s/d 2 kali angsuran	Angsuran Pokok Menunggak 3 s/d 4 kali angsuran	Angsuran Pokok Menunggak 5 s/d 6 kali angsuran	Angsuran Pokok Menunggak diatas 6 kali angsuran
			KOLEKTIBILITAS I	KOLEKTIBILITAS II	KOLEKTIBILITAS III	KOLEKTIBILITAS IV	KOLEKTIBILITAS V
	AFDELUNG 1	174,180,000	21,880,000	-	-	-	-
1	Bunga Raya	19,430,000	6,730,000				
2	Melati II	37,440,000	3,780,000				
3	Melati IV	62,360,000	6,320,000				
4	Seroja	54,950,000	5,050,000				
	KAMPUNG BARU	218,096,000	15,210,000	15,504,000	25,752,000	21,100,000	-
1	Tunas Baru	8,084,000	300,000	8,084,000			
2	Mekar Sari	21,100,000	400,000			21,100,000	
3	Tunas Mekar	25,752,000	250,000	-	25,752,000		
4	Teratai	7,420,000	-	7,420,000			
5	Mekar	64,120,000	5,880,000				
6	Kenanga	45,800,000	4,200,000				
7	Nusa Indah	45,820,000	4,180,000				
	TEBING LINGGAHARA	47,857,000	9,530,000	3,840,000	21,607,000	-	-
1	Jaya Lestari	21,607,000	1,000,000	-	21,607,000		
2	Melati Sari	3,840,000	1,020,000	3,840,000			
3	Kenanga	22,410,000	7,510,000				
	JANUI	28,205,000	1,275,000	1,600,000	25,630,000	-	-
1	Terampil	18,130,000	-		18,130,000		
2	Tangkahan Hulu	1,600,000	-	1,600,000			
3	Bunga Lili	7,500,000	-	-	7,500,000		
4	Mawar	975,000	1,275,000				
	TEBING LINGGAHARA BARU	279,450,000	31,770,000	10,250,000	-	-	-
1	Sejahtera	23,500,000	8,500,000				
2	Indah	33,200,000	8,350,000				
3	Matahari	45,000,000	7,500,000	7,500,000			
4	Sejahtera B	17,425,000	2,515,000				
5	Matahari Indah	22,000,000	-	2,750,000			
6	Bunda	7,475,000	1,105,000				
7	Apel	5,750,000	850,000				
8	Maju Bersama	29,100,000	2,950,000				
9	Mawar	96,000,000	-				
	BANDAR KUMBUL	63,664,000	6,340,000	8,000,000	23,260,000	22,564,000	-
1	Pardomuan	8,000,000	-	8,000,000			

2	Toripang Mata	12,820,000	-	-	12,820,000		
4	Saroja	34,404,000	-	-	-	22,564,000	
5	Saroja II	10,440,000	-	-	10,440,000		
6	Mawar	-	2,600,000				
7	Melati II	-	1,140,000				
8	Anggrek	-	2,600,000				
	SIBARGOT	119,702,000	-	-	-	119,702,000	-
1	Harapan Baru	21,378,000	-	-		21,378,000	
2	Matahari	5,935,000	-	-		5,935,000	
3	Purnama	28,016,000	-	-		28,016,000	
4	Padang Bulan	26,900,000	-	-		26,900,000	
5	Satahi	6,075,000	-	-		6,075,000	
6	Saroja	31,398,000	-	-		31,398,000	
	AEK BURU SELATAN	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
1	Anggrek	10,000,000	-	10,000,000			
	TANJUNG MEDAN	55,940,000	9,510,000	-	-	-	-
3	Aek Malohu	4,900,000	850,000				
4	Aek Salicing	4,900,000	850,000				
5	Matahari	24,340,000	4,110,000				
6	Mandiri Teguh	21,800,000	3,700,000				
	AFDELING II	66,400,000	8,400,000	-	-	-	-
1	Bunga Rose	33,200,000	4,200,000				
2	Bunga Tulip	33,200,000	4,200,000				
	TOTAL	1,065,494,000	103,915,000	49,194,000	96,249,000	163,366,000	-

TINGKAT KOLEKTIBILITAS	Cadangan Resiko Penghapusan (1)	Jumlah Pinjaman (2)	Jumlah Cadangan Penghapusan (3)=(1*2)
KOLEKTIBILITAS I	1%	103,915,000	1,039,150
KOLEKTIBILITAS II	10%	49,194,000	4,919,400
KOLEKTIBILITAS III	25%	96,249,000	24,062,250
KOLEKTIBILITAS IV	50%	163,366,000	81,683,000
KOLEKTIBILITAS V	100%	-	-
TOTAL		412,724,000	111,703,800
Rasio Cadangan Penghapusan Pinjaman		Total (3) / Total (2)	27.07%

Janji, 31 Desember 2016

Diketahui dan Disetujui Oleh,
 Unit Pengelola Kegiatan
 Harija Harum Harahip
 Ketua

Dibuat Oleh,
 Usup Pine
 Bendahara

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERDESAAN

UNIT PENGELOLA KEGIATAN
LAPORAN KOLEKTIBILITAS PINJAMAN SPP

Per 30 Desember 2017

KEC. BILAH BARAT, KAB. LABUHANBATU, PROV. SUMATERA UTARA

NO	Kelompok / Desa	Saldo Pinjaman Bulan Ini (Kolom 13 laporan perkembangan Pinjaman SPP)	Angsuran Pokok lancar (Tanpa tunggakan)	Angsuran Pokok Menunggak 1 s/d 2 kali angsuran	Angsuran Pokok Menunggak 3 s/d 4 kali angsuran	Angsuran Pokok Menunggak 5 s/d 6 kali angsuran	Angsuran Pokok Menunggak diatas 6 kali angsuran
			KOLEKTIBILITAS I	KOLEKTIBILITAS II	KOLEKTIBILITAS III	KOLEKTIBILITAS IV	KOLEKTIBILITAS V
	AFDELING 1	157,720,000	6,040,000	-	-	-	-
1	Bunga Raya	29,720,000	6,040,000				
2	Melati IV	68,000,000					
3	Seraja	60,000,000					
	KAMPUNG BARU	59,656,000	-	15,504,000	25,752,000	21,100,000	-
1	Tunas Baru	6,484,000	-	8,084,000			
2	Mekar Sari	20,000,000	-			21,100,000	
3	Tunas Mekar	25,752,000	-	-	25,752,000		
4	Teratai	7,420,000	-	7,420,000			
5	Mekar	-	-				
6	Kenanga	-	-				
7	Nusa Indah	-	-				
	TEBING LINGGAHARA	61,044,000	16,135,000	3,738,000	20,586,000	-	-
1	Jaya Lestari	20,586,000	-	-	20,586,000		
2	Melati Sari	3,738,000	-	3,738,000			
3	Melati	-	4,200,000				
4	Mawar Merah	520,000	680,000				
5	Bersama	2,880,000	2,920,000				
6	Keranga	33,320,000	8,335,000				
	JANUI	33,230,000	3,000,000	1,600,000	25,630,000	-	-
1	Terampil	16,130,000	-		18,130,000		
2	Tangkahan Hulu	1,600,000	-	1,600,000			
3	Bunga Lili	7,500,000	-	-	7,500,000		
4	Mawar	6,000,000	3,000,000				
	TEBING LINGGAHARA BARU	306,008,000	42,795,000	-	-	-	-
1	Matahari	-	-				
2	Sejahtera B	3,703,000	-				
3	Matahari Indah	5,175,000	-				
4	Mawar	-	-				
5	Anggrek	-	8,370,000				
6	Bunda Setia	-	935,000				
7	Sejahtera	58,090,000	8,350,000				
8	Indah	66,560,000	8,360,000				
9	Matahari	53,200,000	6,700,000				

10	Dahlia	46,480,000	5,880,000				
11	Maju Bersama	45,800,000	4,200,000				
12	Apel	27,000,000					
	BANDAR KUMBUL	106,080,000	14,580,000	8,000,000	22,260,000	22,564,000	-
				8,000,000			
1	Pardomuan	8,000,000	-	-	12,820,000		
2	Torπισang Mata	12,820,000	-	-	-	22,564,000	
4	Saroha	33,040,000	-	-	-		
5	Saroha II	9,440,000	-	-	9,440,000		
6	Mawar	15,000,000	5,000,000				
7	Anggrek	16,500,000	5,500,000				
8	Melati	11,280,000	4,080,000				
	SIBARGOT	108,110,000	-	-	-	119,702,000	-
						21,378,000	
1	Harapan Baru	20,878,000	-	-	-	5,935,000	
2	Malahari	5,935,000	-	-	-	28,016,000	
3	Pumema	28,016,000	-	-	-	26,900,000	
4	Padang Bulan	26,900,000	-	-	-	6,075,000	
5	Salahi	5,503,000	-	-	-	31,398,000	
6	Saroha	20,878,000	-	-	-	-	-
	AEK BURU SELATAN	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
			-	10,000,000			
1	Anggrek	10,000,000	-	-	-	-	-
	TANJUNG MEDAN	195,739,000	25,299,000	-	-	-	-
			3,750,000				
1	Dailhan Na Tolu	3,750,000	3,250,000				
2	Salahi	3,250,000	3,250,000				
3	Dos Ni Pokat	715,000	99,000				
4	Aek Malohu	29,120,000	2,940,000				
5	Aek Salicing	31,755,000	2,950,000				
6	Malahari	68,949,000	6,410,000				
7	Mandiri Teguh	58,200,000	5,900,000				
	AFDELUNG II	110,000,000	10,000,000	-	-	-	-
			5,000,000				
1	Bunga Rose	55,000,000	5,000,000				
2	Bunga Tulip	55,000,000	5,000,000				
	TOTAL	1,147,587,000	117,849,000	38,842,000	94,228,000	163,366,000	-

TINGKAT KOLEKTIBILITAS	Cadangan Resiko Penghapusan (1)	Jumlah Pinjaman (2)	Jumlah Cadangan Penghapusan (3)=(1*2)
KOLEKTIBILITAS I	1%	117,849,000	1,178,490
KOLEKTIBILITAS II	10%	38,842,000	3,884,200
KOLEKTIBILITAS III	25%	94,228,000	23,557,000
KOLEKTIBILITAS IV	50%	163,366,000	81,683,000
KOLEKTIBILITAS V	100%	-	-
TOTAL		414,285,000	110,302,690
Rasio Cadangan Penghapusan Pinjaman		Total (3) / Total (2)	26.62%

Janji, 30 Desember 2017

Diketahui dan Disetujui Oleh,

Unit Pengelola Kegiatan

Harija Hanum Harahap
Ketua

Dibuat Oleh,

Uwup Parle
Bendahara

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERDESAAN

UNIT PENGELOLA KEGIATAN

LAPORAN KOLEKTIBILITAS PINJAMAN SPP

Per 31 Desember 2018

KEC. BILAH BARAT, KAB. LABUHANBATU, PROV. SUMATERA UTARA

KEC.BILAH BARAT, KAB. LABUHANBATU, PROV.SUMATERA UTARA							
NO	Kelompok / Desa	Saldo Pinjaman Bulan Ini (Kolom 13 Laporan perkembangan Pinjaman SPP)	Angsuran Pokok lancar (Tanpa tunggakan)	Angsuran Pokok Menunggak 1 s/d 2 kali angsuran	Angsuran Pokok Menunggak 3 s/d 4 kali angsuran	Angsuran Pokok Menunggak 5 s/d 6 kali angsuran	Angsuran Pokok Menunggak diatas 6 kali angsuran
			KOLEKTIBILITAS I	KOLEKTIBILITAS II	KOLEKTIBILITAS III	KOLEKTIBILITAS IV	KOLEKTIBILITAS V
AFDELING 1		26,920,000	4,200,000	-	-	-	-
1	Bunga Raya	-	-	-	-	-	-
2	Melati IV	-	-	-	-	-	-
3	Seroja	-	-	-	-	-	-
4	Melati II	26,920,000	4,200,000	-	-	-	-
KAMPUNG BARU		107,006,000	20,510,000	13,904,000	25,452,000	20,000,000	-
1	Tunas Baru	6,484,000	-	6,484,000	-	-	-
2	Mekar Sari	20,000,000	-	-	-	20,000,000	-
3	Tunas Mekar	25,452,000	-	-	25,452,000	-	-
4	Teratai	7,420,000	-	7,420,000	-	-	-
5	Nusa Indah	11,200,000	5,880,000	-	-	-	-
6	Keranga	11,200,000	5,880,000	-	-	-	-
7	Mekar	21,780,000	7,580,000	-	-	-	-
8	Anugerah	3,470,000	1,170,000	-	-	-	-
TEBING LINGGAHARA		151,642,000	15,882,000	3,738,000	20,586,000	-	-
1	Jaya Lestari	20,586,000	-	-	20,586,000	-	-
2	Melati Sari	3,738,000	-	3,738,000	-	-	-
3	Mawar Merah	-	-	-	-	-	-
4	Bersama	-	-	-	-	-	-
5	Keranga	25,000,000	5,000,000	-	-	-	-
6	Melati	29,000,000	4,200,000	-	-	-	-
7	Bersama	73,318,000	6,682,000	-	-	-	-
8	Keranga	56,090,000	4,240,000	1,600,000	25,630,000	-	-
JANJI		18,130,000	-	-	18,130,000	-	-
1	Terampil	1,600,000	-	1,600,000	-	-	-
2	Tangkahan Hulu	7,500,000	-	-	7,500,000	-	-
3	Bunga Lili	-	-	-	-	-	-
4	Mawar	28,800,000	4,240,000	-	-	-	-
5	Mawar	256,636,000	49,573,000	-	-	-	-
TEBING LINGGAHARA BARU		3,703,000	3,703,000	-	-	-	-
1	Sejahtera B	1,925,000	1,500,000	-	-	-	-
2	Matahari Indah	15,280,000	8,350,000	-	-	-	-
3	Sejahtera	-	-	-	-	-	-
4	Indah	-	-	-	-	-	-

5	Matahari	14,870,000	6,700,000				
6	Dahlia	13,168,000	5,880,000				
7	Maju Bersama	-	-				
8	Apel	2,250,000	2,250,000				
9	Mawar	26,240,000	6,720,000				
10	Bunda Setia	11,000,000	2,750,000				
11	Anggrek	33,240,000	6,680,000				
12	Maju Bersama	54,960,000	5,040,000				
13	Indah	80,000,000					
	BANDAR KUMBUH	220,440,000	15,940,000	8,000,000	22,260,000	22,564,000	-
	1 Pandomuan	8,000,000	-	8,000,000			
2	Torπισang Mata	12,820,000	-	-	12,820,000		
4	Saroha	33,040,000	-	-	-	22,564,000	
5	Saroha II	9,440,000	-		9,440,000		
6	Mawar	58,200,000	5,900,000				
7	Anggrek	52,380,000	5,310,000				
8	Melati	46,560,000	4,720,000				
	SIBANGOT	117,790,000	-	-	28,001,000	81,729,000	-
1	Harapan Baru	20,878,000	-	-		20,878,000	
2	Matahari	5,935,000	-			5,935,000	
3	Purnama	28,016,000	-	-		28,016,000	
4	Padang Bulan	26,900,000	-	-		26,900,000	
5	Satahi	5,503,000	-	-	5,503,000		
6	Saroha	30,498,000	-		20,498,000		
	AEK BURU SELATAN	-	-	-	-	-	-
1	Anggrek	-	-	-			
	TANJUNG MEDAN	203,194,000	18,040,000	-	-	-	-
1	Aek Malohu	3,594,000	2,940,000				
2	Aek Salicing	-	-				
3	Matahari	-	-				
4	Mandiri Teguh	-	-				
5	Satahi	51,120,000	6,470,000				
6	Dailha Natolu	46,480,000	5,880,000				
7	Dos Ni Pokat	22,000,000	2,750,000				
8	Mandiri Teguh	80,000,000					
	ARDELING II	35,699,000	10,000,000	-	-	-	-
1	Bunga Rose	22,699,000	5,000,000				
2	Bunga Tulip	13,000,000	5,000,000				
	TOTAL	1,175,297,000	138,373,000	27,242,000	119,929,000	124,293,000	-

TINGKAT KOLEKTIBILITAS	Cadangan Resiko Penghapusan (1)	Jumlah Pinjaman (2)	Jumlah Cadangan Penghapusan (3)=(1*2)
KOLEKTIBILITAS I	1%	138,375,000	1,383,750
KOLEKTIBILITAS II	10%	27,242,000	2,724,200
KOLEKTIBILITAS III	25%	119,929,000	29,982,250
KOLEKTIBILITAS IV	50%	124,293,000	62,146,500
KOLEKTIBILITAS V	100%	-	-
TOTAL :		409,839,000	96,236,700
Rasio Cadangan Penghapusan Pinjaman :		Total (3) / Total (2)	23.48%

Janji, 31 Desember 2018

Diketahui dan Disetujui Oleh,
Unit Pengelola Kegiatan

Ditandatangani Oleh,
Usup Hane Bendahe

Harija Harum Harahap
Ketua





Foto bersama sesi wawancara dengan pihak UPK Bilah Barat



Foto bersama sesi wawancara dengan ibu Norma Ketua Kelompok Matahari SPP Bilah Barat



Foto bersama sesi wawancara dengan ibu Ati Anggota Kelompok Purnama SPP Bilah Barat

Wawancara dilakukan dengan pihak UPK Bilah Barat yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Kelompok Matahari SPP Bilah Barat dan Anggota Kelompok Purnama SPP Bilah Barat.

Pertanyaan ke-1: Bagaimana sistem pengendalian *intern* piutang yang diterapkan di PNPM-Mandiri bagian SPP di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu?

Pihak UPK I

Nama : Syahriza
Jabatan : Ketua
Umur : 31 tahun

Penuturan hasil wawancara: “Sistem yang digunakan di PNPM-Mandiri bagian SPP Bilah Barat ini yaitu sistem tanggung renteng, maksudnya setiap kelompok menyimpan atau menabung uang dengan mekanisme aturan dalam mengelola tabungan tersebut hanya kelompok itu sendiri yang mengelola nya. Gunanya ketika nanti ada anggota dalam kelompok tersebut yang tidak mampu membayar, maka akan dibayarkan dahulu menggunakan uang tabungan tersebut atau ini disebut tanggung renteng.”

Pihak UPK II

Nama : Arfah
Jabatan : Sekretaris
Umur : 28 tahun

Penuturan hasil wawancara: “Dengan sistem tanggung renteng, sistem tanggung renteng adalah upaya menghindari terjadinya piutang macet, jika nantinya ada anggota yang tidak mampu membayar angsuran pinjaman, maka tanggung renteng ini yang akan mengatasinya.”

Pihak UPK III

Nama : Usuf
Jabatan : Bendahara
Umur : 30 tahun

Penuturan hasil wawancara: “Tanggung renteng, karena dikhawatirkan pasti dalam piutang terjadi masalah dalam pembayaran,

jadi untuk mengatasi anggota yang tidak mampu membayar angsurannya, tanggung renteng merupakan sistem yang tepat untuk hal ini.”

Pertanyaan ke-2: Bagaimana UPK Bilah Barat dalam mengelola Simpan Pinjam Perempuan di PNPM-MPd Kec. Bilah Barat Kab. Labuhanbatu ini?

Pihak UPK I: “Kami sebagai tim pengelola SPP UPK Bilah Barat, memberikan perhatian penuh dan khusus untuk kegiatan SPP ini, karena tanggungjawabnya juga sangat besar, sebelum memberikan pinjaman kami sangat berhati-hati dalam memilih kelompok yang layak untuk menerima pinjaman ini, karena jika kelompoknya tidak layak menerima pinjaman, modal tidak akan bisa di gulirkan ke kelompok lain.”

Pihak UPK II: “Biasanya setiap bulan nya kami menerima setoran angsuran tunai dari tiap-tiap kelompok, sampai hitungan satu tahun. Dan dari angsuran pinjaman tersebut akan digulirkan kembali kepada kelompok-kelompok yang setelah memenuhi syarat perguliran.”

Pihak UPK III: “Sebelum mencairkan atau ada kelompok yang membayar angsuran pinjaman, PNPM-Mandiri bekerjasama dengan pihak Bank, dan di UPK Bilah Barat sendiri bekerjasama dengan Bank Sumut.”

Pertanyaan ke-3: Syarat apa sajakah yang harus dipenuhi dalam pengajuan piutang?

Pihak UPK I: “Syarat untuk mengajukan pinjaman SPP di UPK Bilah Barat yaitu, membuat proposal yang didalam proposal tersebut identitas anggota kelompok, jenis usaha dan besaran jumlah pinjaman yang akan diajukan. Kemudian mempunyai KTP, baik KTP istri dan juga

suami, membuat surat pernyataan bahwa suami mengizinkan istrinya melakukan SPP ini, pasphoto 3x4 dan yang terakhir membuat surat pernyataan tanggung renteng.”

Pihak UPK II: “Anggota kelompok merupakan asli warga Bilah Barat, dan pinjaman tidak diberikan dalam bentuk individu harus melalui kelompok yang dalam kelompok tersebut mempunyai ketua, sekretaris dan bendahara kelompok dan sekurang-kurangnya anggota kelompok terdiri dari 8-16 orang, membuat proposal pinjaman, mempunyai KTP istri dan suami, surat izin suami, pasphoto 3x4 dan surat pernyataan tanggung renteng.”

Pihak UPK III: “Harus membuat proposal, surat pernyataan tanggung renteng, surat izin suami, KTP suami istri dan pasphoto 3x4.”

Pertanyaan ke-4: Bagaimana prosedur perguliran dana agar kelompok tetap bisa menerima dana bergulir?

Pihak UPK I: “Dengan mengajukan proposal kelompok kembali dan persyaratan-persyaratan pengajuan piutang pada pertanyaan sebelumnya, setelah semuanya sudah terpenuhi maka akan dilakukan verifikasi kepada kelompok yang mengajukan dari pihak UPK sebanyak 3 (tiga) orang untuk mengetahui bagaimana keaktifan anggota dalam membayar pinjaman, ini juga sekaligus menentukan dalam pe-ranking kelompok-kelompok SPP Bilah Barat, karna untuk ranking yang teratas terlebih dahulu bisa melakukan pencairan dana bergulir sebagai apresiasi agar kelompok lain semangat dan aktif membayar pinjaman tepat waktu, setelah semua persyaratan lulus verifikasi dana akan di gulirkan.”

Pihak UPK II: “Melakukan persyaratan-persyaratan pengajuan piutang lagi, setelah itu akan di verifikasi kebenaran nama kelompok

tersebut, bagaimana keaktifan anggota membayar pinjaman, setelah lulus verifikasi kelompok bisa menerima dana bergulir.”

Pihak UPK III: “Dengan persyaratan pengajuan pinjaman lagi, seperti proposal, KTP suami/istri, surat izin dari suami melakukan pinjaman, surat tanggung renteng, dan pasphoto 3x4 setelah itu dilakukan verifikasi dari pihak UPK sebanyak tiga orang.”

Pertanyaan ke-5: Bagaimana mekanisme pembayaran piutang yang diterapkan?

Pihak UPK I: “Mekanisme pembayaran piutang yang diterapkan dengan membayar pinjaman secara angsur setiap bulan selama setahun melalui ketua kelompok, jika ada anggota yang mengalami kesulitan membayar pinjaman disinilah sistem tanggung renteng akan berlaku untuk menghindari piutang macet.”

Pihak UPK II: “Anggota kelompok membayar kepada ketua kelompok dengan bantuan sekretaris dan bendahara kelompok, kemudian ketua kelompok membayar pinjaman kepada pihak UPK secara berangsur yaitu setiap bulan selama setahun.”

Pihak UPK III: “Pembayaran pinjaman SPP dilakukan secara angsur setiap bulan dengan bunga 10% per tahun.”

Pertanyaan ke-6: Apa faktor penyebab kelompok yang melakukan tunggakan SPP?

Pihak UPK I: “Ada beberapa faktor seperti kendala pada usaha anggota kelompok, karna mengalami rugi dari usaha nya atau bahkan ada juga yang sampai bangkrut, tetapi tak jarang juga ternyata ada anggota

yang tidak menggunakan modal pinjaman SPP ini untuk modal usaha, jadi akan terasa sulit dalam pengembalian pinjaman.”

Pihak UPK III: “Sebagian anggota ada yang menganggap remeh, mereka mengira karna uang ini merupakan uang pemerintah jadi tidak masalah jika terjadi tunggakan atau bahkan ada yang sampai tidak mau bayar.”

Pihak UPK III: “Anggota sering anggap remeh, meskipun sudah melakukan sistem tanggung renteng di dalam kelompok masih sering terjadi tidak mau berpartisipasi, padahal kan seharusnya sistem tanggung renteng ini solusi saat ada anggota tidak mampu membayar pinjaman.”

Pertanyaan ke-7: Sanksi apa yang diberikan bagi kelompok yang melakukan tunggakan?

Pihak UPK I: “Untuk pinjaman berikutnya akan dibatasi jumlahnya namun jika masih melakukan tunggakan juga pinjaman tidak akan diberikan lagi.”

Pihak UPK II: “Jika kelompok melakukan tunggakan maka akan diberikan sanksi ringan dengan membatasi pinjaman atau pinjaman akan lebih sedikit dari jumlah maksimum namun jika masih bandel pinjaman tidak akan diberikan lagi.”

Pihak UPK III: “Dengan sanksi membatasi jumlah pinjaman dan kalau masih menunggak juga tidak diberikan lagi.”

Pertanyaan ke-8: Apa kendala UPK Bilah Barat dalam penagihan piutang?

Pihak UPK I: “Kendala dalam penagihan piutang pasti selalu tunggakan pinjaman ya, kadang kelompok nya itu bandel walaupun sudah dibicarakan baik-baik mereka masih ada yang malas dan menganggap remeh, bahkan tidak mau lagi membayar.”

Pihak UPK II: “Kalau terjadi tunggakan, ada kelompok yang desanya cukup jauh jadi kalau ditagih langsung door to door pun cukup memakan waktu bahkan kadang tidak dianggap serius sama kelompok masih saja ada yang tidak mau bayar.”

Pihak UPK III: “Tunggakan menjadi kendala serius dalam penagihan piutang apalagi kalau ada kelompok itu yang gak mau bayar lagi.”

Pertanyaan ke-9: Kebijakan apa yang dilakukan pihak UPK Bilah Barat untuk meyakinkan kelompok membayar piutang tepat waktu?

Pihak UPK I: “Sebelum memberikan pinjaman kami berikan arahan terhadap kelompok, seperti perjanjian tanggal kapan pengembalian pinjaman, sanksi-sanksi yang akan diterima jika tidak membayar, pengaruhnya terhadap kelompok lain jika tidak membayar pinjaman tepat waktu.”

Pihak UPK II: “Membuat kesepakatan bersama kapan tanggal pembayaran dan sanksi apa yang diberikan jika tidak mengembalikan tepat waktu.”

Pihak UPK III: “Peringatan risiko jika tidak membayar tepat waktu, membuat kesepakatan tanggal pembayaran, sanksi-sanksi apa yang diberikan jika melakukan tunggakan, dan dilakukan ranking kelompok, kelompok yang teratas menerima pinjaman terlebih dahulu.”

Pertanyaan ke-10: Tindakan apa yang dilakukan UPK Bilah Barat untuk mengurangi dan mengatasi risiko piutang macet?

Pihak UPK I: “Tahapan pertama dengan memberi peringatan kepada kelompok melalui ketua kelompok, baik melalui telepon ataupun surat, tahapan kedua dengan melakukan kunjungan personal, tahapan yang ketiga dengan mengadakan musyawarah dengan kelompok beserta di dampingi kepala desa untuk dibicarakan secara baik-baik, dan tahapan yang terakhir dengan tindakan hukum.”

Pihak UPK II: “Memberikan surat ataupun menelpon ketua kelompok untuk peringatan halus, jika tidak dihiraukan juga maka akan dilakukan door to door untuk menanyai kendala dan kesulitan yang dialami serta memberikan solusi dalam mengembalikan kredit, jika tidak dihiraukan juga maka akan dilakukan musyawarah dengan kelompok didampingi kepala desa, dan yang terakhir dengan hukum.”

Pihak UPK III: “Dengan sistem tanggung renteng tadi, supaya kalau ada anggota kelompok yang melakukan tunggakan pembayaran didahulukan dari tanggung renteng tadi, namun jika masih terjadi masalah dalam pembayaran kami akan memberi peringatan kepada kelompok melalui telepon, melakukan kunjungan personal, musyawarah kekeluargaan dan kalau tidak juga membayar maka akan melalui jalur hukum.”

Pertanyaan : Apa faktor penyebab kelompok (anda) melakukan penunggakan pembayaran?

Kelompok SPP di Sibargot

Nama : Norma
Jabatan : Ketua Kelompok Matahari
Umur : 48 tahun

“Di kelompok Matahari sendiri sudah mengalami penunggakan pembayaran sampai berbulan-bulan, alasannya karna modal yang sudah kami terima tidak mampu kami kembalikan lagi disebabkan beberapa diantara kami mengalami kesulitan ekonomi, bahkan sebagian anggota kelompok menganggap kalau uang ini kan uang negara, nggak apa-apa kalau gak dibayar.”

Kelompok SPP di Sibargot

Nama : Ati
Jabatan : Anggota Kelompok Purnama
Umur : 36 tahun

“Saya sudah tiga bulan terakhir tidak melakukan pembayaran SPP yang seharusnya dibayar setiap bulannya kepada PNPM, karena keluarga saya mengalami kesulitan, lagipula sudah seharusnya pemerintah membantu setiap masyarakat yang kesulitan, modal SPP ini kan merupakan uang negara yang juga rakyat berhak atas uang negara ini”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Siti Aminah Pane
Tempat/Tgl. Lahir : Bakti Abri II, 14 Agustus 1997
Alamat : Bakti Abri II, Desa Sibargot, Kec. Bilah Barat,
Kab. Labuhanbatu
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Totap Pane
Nama Ibu : Roihani Hasibuan

II. PENDIDIKAN

1. SDN 112159 Sibargot, Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu
2. MTS Habibullah Sibargot, Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu
3. MAS Habibullah Sibargot, Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu
4. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

III. ORGANISASI

LDK AL-IZZAH UIN SUMATERA UTARA